

BUKU AJAR

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
(Kerangka Dasar)

Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Publik
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun oleh:
Dr. Kismartini, Msi



Undip Press
Semarang

BUKU AJAR

Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)

Disusun oleh:

Dr.Kismartini, MSi.

Mata Kuliah	: Analisis Kebijakan Publik
SKS	: 3 SKS
Semester	: 4
Program Studi	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Diterbitkan oleh:

UNDIP PRESS
SEMARANG

Jl. Prof. Sudarto, SH – Kampus Tembalang, Semarang

ISBN : 978-979-097-627-6

Revisi 0, Tahun 2019

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Diizinkan menyitir dan menggandakan isi buku ini dengan memberikan apresiasi sebagaimana kaidah yang berlaku.

PERSEMBAHAN

Buku ini kami dedikasikan untuk mahasiswa
S1, S2, S3 Departemen Administrasi Publik
FISIP-Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, anugerah, dan hidayah-Nya sehingga buku ajar mata kuliah Analisis Kebijakan Publik dapat selesai dan hadir di tengah-tengah civitas akademika Universitas Dponegoro. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Direktorat Pengembangan Pembelajaran dan Kerjasama Akademik (DP2KA) UNDIP dan Tim LP2MP UNDIP yang telah membatu penerbitan buku ajar ini

Buku ini berisi tentang konsep dasar analisis kebijakan publik; manfaat analisis kebijakan publik; langkah-langkah dasar analisis kebijakan publik; mengaplikasikan format *policy paper*.

Dengan penyusunan buku ajar ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi mahasiswa departemen administrasi publik sebagai salah satu dasar pengetahuan untuk menjembatani antara pemahaman teoritis analisis kebijakan publik dan bagaimana aplikasinya dalam memecahkan masalah publik.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini masih jauh dari sempurna, baik dari penyusunanya, tata bahasanya dan susbtansinya. Sehingga kritik maupun saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
TINJAUAN MATA KULIAH.....	1
I. Deskripsi Singkat.....	1
III. Capaian Pembelajaran	1
1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	1
2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	1
3. Indikator.....	2
ANALISIS PEMBELAJARAN.....	3
BAB I KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.....	5
1. 1 Pendahuluan	5
1.1.1 Deskripsi Singkat	5
1.1.2 Relevansi.....	5
1.1.3 Capaian Pembelajaran.....	5
1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	5
1.1.4 Petunjuk Pembelajaran.....	6
1.2 Penyajian	6
1.2.1 Analisis Kebijakan Publik.....	6
1.2.2 Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik.....	8
1.2.3 Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan Publik.....	10
1.2.4 Elemen-Elemen Penting Dalam Analisis Kebijakan Publik.....	11
1.2.5 Latihan	13

1.3 Penutup.....	14
1.3.1 Rangkuman	14
1.3.2 Test Formatif.....	14
1.3.3 Umpan Balik	16
1.3.4 Tindak Lanjut.....	16
1.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif	17
Daftar Pustaka.....	17
Senarai.....	18
BAB II Manfaat Analisis Kebijakan Publik	19
2.1 Pendahuluan	19
2.1.1 Deskripsi Singkat	19
2.1.2 Relevansi.....	19
2.1.3. Capaian Pembelajaran.....	19
2.1.4 Petunjuk Pembelajaran.....	20
2.2 Penyajian	20
2.2.1 Pentingnya Analisis Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Manfaat Analisis Kebijakan Publik	21
2.2.3 Macam-macam Analisis Kebijakan Publik.....	24
2.2.4 Latihan	25
2.3 Penutup.....	25
2.3.1 Rangkuman	25
2.3.2 Test Formatif.....	26
2.3.3 Umpan Balik	28
2.3.4 Tindak Lanjut.....	28
2.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif	28
Daftar Pustaka.....	28
Senarai.....	29

BAB III Langkah-Langkah Analisis Kebijakan Publik	30
3.1 Pendahuluan	30
3.1.1 Deskripsi Singkat	30
3.1.2 Relevansi.....	30
3.1.3 Capaian Pembelajaran.....	30
3.1.4 Petunjuk Pembelajaran.....	31
3.2 Penyajian	31
3.2.1 Berbagai Pendapat Ahli Mengenai Proses Analisis Kebijakan Publik.....	31
3.2.2 Langkah-Langkah Analisis Kebijakan Publik	34
3.2.3 Ragam Pendekatan Analisis Kebijakan	43
3.2.3 Latihan	45
3.3. Penutup.....	45
3.3.1 Rangkuman	45
3.3.2 Test Formatif.....	45
3.3.3 Umpan Balik	48
3.3.4 Tindak Lanjut.....	48
3.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif	48
Daftar Pustaka.....	49
Senarai.....	50
BAB IV Pembuatan Policy Paper	51
4.1 Pendahuluan	51
4.1.1 Deskripsi Singkat	51
4.1.2 Relevansi.....	51
4.1.3 Capaian Pembelajaran.....	51
4.1.4 Petunjuk Pembelajaran.....	52
4.2 Penyajian	52
4.2.1 Masalah dan Tujuan dalam Policy Paper.....	52

4.2.2 Esensi Nilai (Values) dalam kebijakan	52
4.2.3 Menyiapkan Sebuah “ <i>FORMAT POLICY PAPER</i> ”	55
4.2.4 Latihan	61
4.3 Penutup.....	62
4.3.1 Rangkuman	62
4.3.2 Test Formatif.....	64
4.3.3 Umpan Balik	67
4.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif	67
Daftar Pustaka.....	69
Senarai.....	69
INDEX	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Macam- Macam Analisis Kebijakan Publik	24
Bagan 3. 1 Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah	33
Bagan 3. 2 Iterasi Analisis Kebijakan.....	34
Bagan 3. 3 Contoh Pohon Masalah.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ilustrasi Latihan.....	13
Gambar 1. 2 Ilustrasi Soal.....	16
Gambar 3. 1 Masalah Plastik di Indonesia.....	38
Gambar 3. 2 Ilustrasi Soal.....	48
Gambar 4. 1 Ilustrasi Masalah	60
Gambar 4. 2 Ilustrasi Masalah	61
Gambar 4. 3 Ilustrasi Kasus	67

TINJAUAN MATA KULIAH

I. Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik. Secara berturut-turut akan membahas definisi dan manfaat analisis kebijakan publik, langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik serta metode analisis kebijakan publik. Yang pada akhirnya mahasiswa mampu menganalisis suatu isu kebijakan publik dengan mengaplikasikannya dalam sebuah *policy paper*.

II. Relevansi

Mata kuliah Analisis Kebijakan Publik ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi mahasiswa Departemen Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Publik sebagai bekal pengetahuan yang menjembatani antara pemahaman teoritis tentang analisis kebijakan publik dan bagaimana aplikasinya dalam memecahkan sebuah masalah publik.

III. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisa (C4) kebijakan publik secara komprehensif sebagai bekal untuk memecahkan masalah publik secara tepat.

2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Dengan mahasiswa mampu menganalisa kebijakan publik secara komprehensif, mahasiswa diharapkan akan mampu:

- a. Menjelaskan (C2) konsep dasar analisis kebijakan publik
- b. Menjelaskan (C2) manfaat analisis kebijakan publik
- c. Menjelaskan (C2) langkah-langkah dasar dalam analisis kebijakan publik
- d. Mengaplikasikan (C3) format *policy paper* dalam pemecahan masalah publik
- e. Menganalisis (C4) masalah dalam analisis kebijakan publik
- f. Menganalisis (C4) tujuan dalam analisis kebijakan publik
- g. Menganalisis (C4) alternatif kebijakan dalam analisis kebijakan publik
- h. Menerapkan (C3) metode dalam analisis kebijakan publik
- i. menganalisis (C4) alternatif kebijakan dan memberikan rekomendasi

3. Indikator

Mahasiswa mampu memahami (C2) analisis kebijakan publik secara baik, sehingga mampu memecahkan masalah publik dengan tepat. Dengan pemahaman mahasiswa terkait dengan analisis kebijakan publik diharapkan mampu:

- a. Mengidentifikasi (C1) dasar-dasar analisis kebijakan publik
- b. Mengetahui (C1) manfaat dari analisis kebijakan publik.
- c. Menguraikan (C2) langkah-langkah analisis kebijakan publik
- d. Mengerti (C1) pembuatan policy paper secara benar
- e. Memahami (C2) masalah analisis kebijakan publik
- f. Mengerti (C1) tujuan analisis kebijakan publik
- g. Mengerti (C1) proses penyusunan alternatif kebijakan dalam analisis kebijakan publik
- h. Memahami (C2) penggunaan metode dalam analisis kebijakan publik
- i. Memilih (C1) alternatif kebijakan secara tepat dan mengembangkannya (C2) sebagai rekomendasi kebijakan

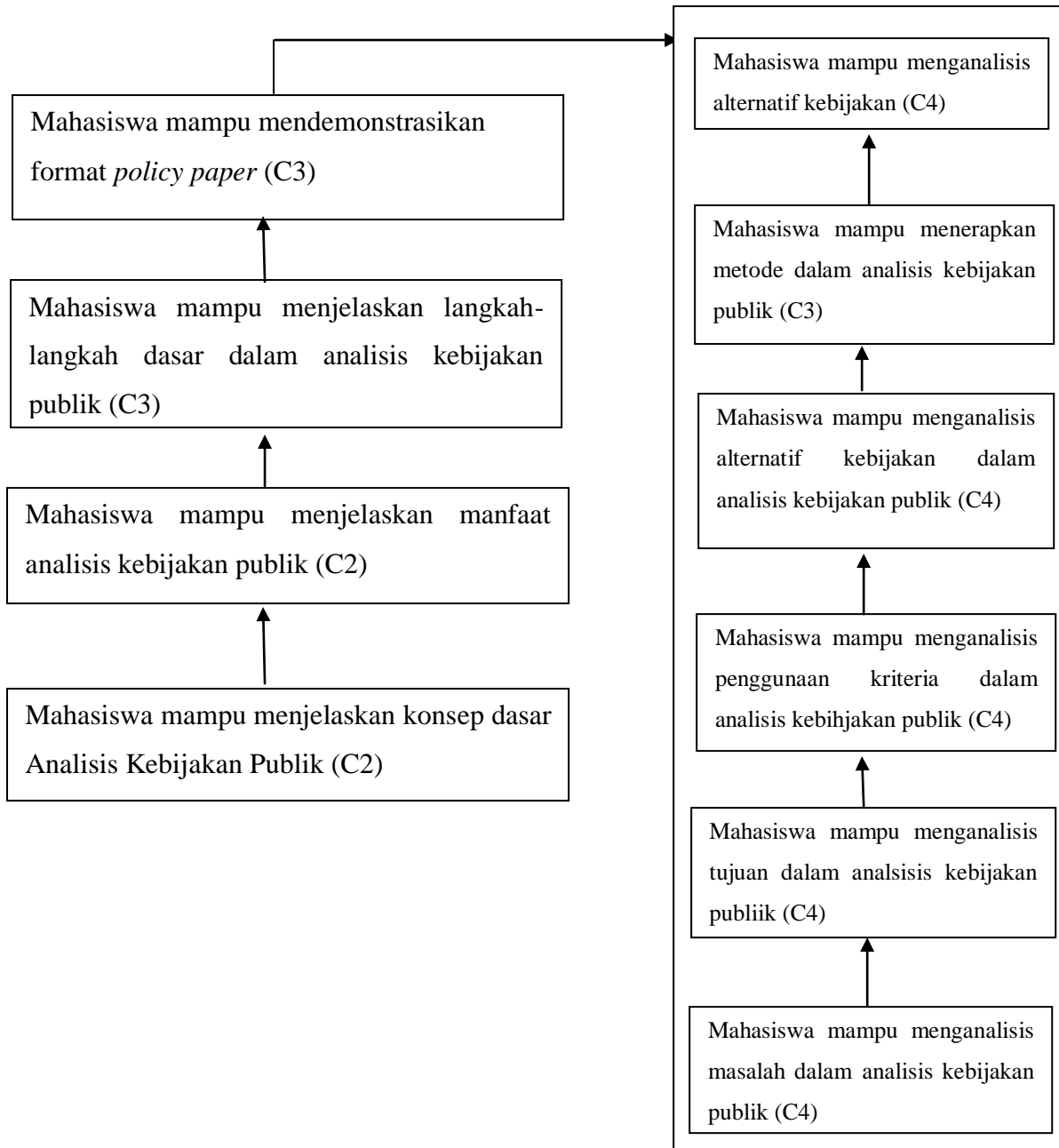
ANALISIS PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Publik

Kode MK :

Kelompok MK:

SKS : 3 SKS



BAB I

KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1. 1 Pendahuluan

1.1.1 Deskripsi Singkat

Konsep Dasar Analisis Kebijakan Publik ini berisikan tentang hal-hal dasar yang perlu diketahui oleh mahasiswa yang mempelajari tentang Analisis Kebijakan Publik. Adapun isi pokok bahasan ini terdiri dari 4 kegiatan belajar: pengertian dari analisis kebijakan publik yang menguraikan tentang pengertian-pengertian dasar analisis kebijakan publik, perbedaan kebijakan publik dan analisis kebijakan publik; bentuk-bentuk dari analisis kebijakan publik; dan elemen-elemen penting dalam analisis kebijakan publik

1.1.2 Relevansi

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan (C2) definisi dan manfaat dari analisis kebijakan publik, mampu menjelaskan (C2) secara garis besar konsep dasar dari analisis kebijakan publik. Sehingga dengan mempelajari bab ini mahasiswa lebih mudah mempelajari bab bab selanjutnya yang menjelaskan secara lebih detail elemen-elemen penting dari analisis kebijakan publik dan langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik.

1.1.3 Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep dasar analisis kebijakan publik dari beberapa ahli. Selain itu mahasiswa mampu membedakan antara analisis kebijakan publik dan kebijakan publik.

2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mahasiswa mengetahui (C1) pengertian analisis kebijakan publik.
2. Mahasiswa mampu membedakan antara kebijakan publik dan analisa kebijakan publik
3. Mahasiwa mampu membedakan analisis sebelum dan sesudah analisis kebijakan.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) elemen-elemen penting dalam analisis kebijakan publik

1.1.4 Petunjuk Pembelajaran

Baca dan pahami dengan teliti, serta cermat materi yang disajikan baik itu dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau resume. Kerjakan semua latihan soal dan tes formatif kemudian verifikasi jawaban anda dengan kunci jawaban yang disertakan pada bagian akhir Buku Ajar ini.

1.2 Penyajian

1.2.1 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik dalam kehidupan tata negara mempunyai peranan yang sangat penting. Analisis kebijakan publik merupakan sebuah ilmu terapan yang menggabungkan dari beberapa ilmu atau multidisipliner. Dalam melakukan analisis kebijakan publik banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu psikologi.

Analisis kebijakan publik merupakan ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kebijakan kepada *policy maker* untuk memecahkan masalah-masalah publik. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik yang diambil merupakan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi masyarakat.

Perkembangan dan pergeseran paradigma administrasi publik dari orientasi birokrasi (*Old Public Administration*) dalam pengambilan kebijakan ke arah kepentingan publik (*New Public Services*) telah membawa perubahan dalam kebijakan publik. Proses kebijakan publik tidak lagi menjadi milik birokrasi semata, tetapi juga harus mengakomodasi kepentingan publik, yang dalam hal ini termasuk masyarakat dan swasta. Oleh karena itu sangat diperlukan pengetahuan tentang permasalahan publik ini oleh penentu kebijakan (*decision maker*).

Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan. Semua itu didapatkan dari kajian mendalam tentang permasalahan-permasalahan kebijakan. Informasi yang didapat dari kajian mendalam tentang permasalahan kebijakan inilah yang akan dipakai sebagai argumen dalam memberikan bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan dalam arti luas adalah satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosial

teknis dan untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik. Karena berusaha menggunakan ilmu modern dan teknologi modern dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, analisis kebijakan mencari langkah-langkah yang mudah diamati, menyusun informasi dan bukti-bukti serta pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh penerapan suatu kebijakan yang dilakukan untuk membantu para pembuat kebijakan didalam memilih tindakan yang paling menguntungkan. Operation riset, analisis sistem, sistem biaya dan manfaat dan analisis efektifitas biaya ada dalam kategori yang sama dan sering dipakai dalam studi analisis kebijakan. Namun analisis kebijakan memperhitungkan kesulitan-kesulitan politik dan organisasi yang berhubungan dengan keputusan publik dan implementasinya.

Kata analisis dalam analisis kebijakan digunakan dalam arti yang paling umum. Kata itu menyiratkan penggunaan intuisi dan penilaian, dan mencakup tidak hanya pengamatan suatu kebijakan dengan melihat kedalam komponen-komponennya namun juga disain dan sintesis dari alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan atas isu atau masalah yang diantisipasi, hingga penelitian evaluasi dari suatu program keseluruhan.

Walaupun analisis kebijakan bisa mencakup sejumlah besar varietas analisis studi dan penelitian, disini kita bicara mengenai satu bentuk tertentu dari analisis kebijakan yakni analisis untuk kebijakan-kebijakan publik. Tujuan dari analisis semacam ini adalah untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik yang dihadapi. Bukan penelitian untuk ilmu pengetahuan saja, analisis ini juga bukan hanya mengkaji tentang sebab akibat dari fenomena sosial saja dan bukan pula penjelasan tentang fenomena tersebut. Penelitian analisis seperti yang dimaksud ini adalah dibutuhkan untuk membantu memformulasikan sebuah kebijakan publik. Sehingga hasil analisis kebijakan yang baik akan berfungsi sebagai embrio dari sebuah agenda kebijakan (*policy agenda*).

Pekerjaan analisis kebijakan publik ini relevan dikerjakan oleh badan independen di luar birokrasi pemerintahan, sehingga didapatkan analisis kebijakan publik yang bebas nilai ataupun kepentingan. Bisa dilakukan oleh biro konsultasi manajemen publik, Universitas ataupun lembaga-lembaga penelitian lainnya. William N. Dunn (1998) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer and Vining, 1998-1.: *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi analisis kebijakan publik lebih

merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by providing information through research and analysis, isolating and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways of translating ideas into feasible and realizable policies. Its major contribution may be to yield insight particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters. It is no more than adjunct, although a powerful one, to the judgment, intuition, and experience of decision makers. (Quade, 1982-11).

Menurut Quade, analisis kebijakan publik diartikan sebagai sebuah penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan masalah yang lebih baik. Kemudian Stuart S. Nagel menambahkan bahwa analisis kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara alternatif kebijakan dan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan suatu hal penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya.

1.2.2 Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang analisis kebijakan publik. Kita perlu mengetahui apa itu kebijakan publik. Sebagai seorang ilmuwan sosial kebijakan publik tentu tidak asing ditelinga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam obrolan sehari-hari di kalangan awam, professional maupun akademisi, kebijakan publik sering diutarakan sebagai sesuatu yang abstrak, tidak jelas, kabur dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Padahal bukan demikian. Kebijakan publik mempunyai dampak bagi kehidupan kita bersama. Misalnya akhir-akhir ini kita mendengar pemerintah berencana membuat kebijakan tentang pemindahan Ibu Kota Negara atau Pemerintah memberlakukan kebijakan impor gula untuk menutupi kebutuhan gula industri dalam negeri.

Ada perbedaan yang jelas antara kebijakan publik dengan analisis kebijakan publik, hal ini perlu dikemukakan disini agar tidak terjebak kerancuan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul. Namun demikian bukan berarti perbedaan ini membuat garis pemisah antara dua pengertian yang tidak dapat dihubungkan, akan tetapi hanya sekedar kepentingan konseptual.

Perbedaan tersebut dapat dikemukakan bahwa, **Kebijakan Publik** adalah arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas, misalnya kebijakan pemerintah tentang sistem jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini ditegaskan bahwa secara garis besar kebijakan publik mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Sedangkan **Analisis Kebijakan Publik** berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan. Jadi misalnya seorang pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi dan keresahan masyarakat, maka sebenarnya ia sudah melakukan analisis kebijakan publik.

Analisis kebijakan publik yang lebih komprehensif dengan pelibatan banyak *expert* dan praktisi misalnya dilakukannya analisis tentang kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 khususnya No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keefektifan dari kebijakan ini yang hasilnya dapat diketahui dengan adanya rekomendasi untuk revisi terhadap Undang-Undang tersebut yang akhirnya terbit Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut dan direvisi lagi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Contoh lainnya adalah analisis kebijakan publik tentang Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial, apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah efektif. Analisis kebijakan akan merekomendasikan apakah Kementerian Sosial akan menghentikan program ini, atau membuat perbaikan-perbaikan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Atau bahkan mencari alternatif baru untuk meningkatkan keberhasilan dalam kebijakan tersebut.

Seorang analis kebijakan publik akan memposisikan ilmunya sebagai sesuatu yang bebas nilai, analis bekerja atas kepentingan publik, tanpa ada pengaruh kepentingan-kepentingan politik ataupun golongan. Jadi seorang analis dapat mengambil posisi netral dalam memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

1.2.3 Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Contoh: Ketika analis kebijakan mengkaji tentang pemekaran suatu wilayah, dan rekomendasinya adalah Kebijakan untuk pemekaran atau kebijakan untuk tidak dimekarkan. Analisis semacam ini ini adalah analisis sebelum adanya kebijakan. Analisis kebijakan setelah adanya kebijakan fokus analisisnya adalah pada kebijakan yang telah ada. Contoh: Analisis Kebijakan tentang Sistem Desentralisasi Pemerintahan (UU no 22 tahun 1999), yang menghasilkan rekomendasi tentang penyempurnaan atau revisi dari Undang-Undang tersebut.

Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Dunn (1998): h.117 mengemukakan bahwa hubungan antara informasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik: (1) Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan. (2) Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan

kelemahan (3) Analisis Kebijakan yang Terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Permasalahan publik cenderung lebih rumit didefinisikan dibanding dengan masalah-masalah di bidang industri atau militer dimana analisis sistem dan *research operation* (cikal bakal analisis kebijakan) dipakai, masalah-masalah industri dan militer lebih banyak ditentukan oleh teknologi. Masalah semacam ini cenderung lebih mudah diformulasikan dan metode-metode kuantitatif barangkali lebih banyak membantu dalam menemukan jalan keluar. Sehingga perusahaan-perusahaan dan agen-agen pemerintah yang menyerupai perusahaan telah menjadi pengguna yang berhasil dari analisis sistem. Sedangkan masalah-masalah publik jauh lebih rumit, karena menyangkut perilaku banyak orang. Misalnya bagaimana meyakinkan orang untuk tertib di jalan raya, bagaimana memanfaatkan lingkungan secara bijak, bagaimana menertibkan anak jalanan dan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan seterusnya.

Analisis kebijakan sangat penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan antara tujuan dan realisasinya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara atau ide-ide untuk merealisasikannya. Dengan demikian diharapkan hasil analisis kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik di masa depan.

1.2.4 Elemen-Elemen Penting Dalam Analisis Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan analisis kebijakan publik, analis haruslah memahami elemen-elemen dasar yang diperlukan ketika melakukan analisis kebijakan publik. Terdapat lima elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis dalam menangani masalah publik, yakni :

1. Tujuan-Tujuan

Tujuan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya. Tugas yang seringkali paling sulit bagi analis adalah menyingkap apakah memang benar atau tidak tujuan tersebut. Kadang diutarakan secara jelas namun seringkali tidak langsung oleh

pembuat kebijakan. Maka tugas analisis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan persetujuan mengenai tujuan yang sebenarnya.

2. Alternatif-Alternatif

Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai. Alternatif-alternatif bisa berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau tindakan-tindakan. Alternatif-alternatif tidak harus jelas merupakan pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama. Misalnya pendidikan, rekreasi, penjagaan keamanan oleh polisi, perumahan murah untuk mereka yang berpenghasilan rendah, ini semua secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan dalam berbagai cara semuanya mungkin harus dipertimbangkan sebagai alternatif-alternatif kebijakan untuk masalah kenakalan remaja.

3. Dampak-Dampak

Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan mengimplikasikan serangkaian konsekuensi tertentu. Jadi dampak ini berhubungan dengan alternatif. Beberapa diantaranya bersifat positif dan berdampak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan. Beberapa yang lain merupakan biaya, atau konsekuensi negatif sehubungan dengan alternatif tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisir oleh pembuat keputusan.

4. Kriteria

Kriteria adalah suatu aturan atau standar untuk mengurutkan alternatif-alternatif menurut urutan yang paling diinginkan. Kriteria merupakan cara menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif dan dampak-dampak. Banyak orang menghubungkan atau bahkan mengganti istilah kriteria dengan skala efektivitas, yakni skala yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan.

5. Model

Model tidak lebih dari serangkaian generalisasi atau asumsi tentang dunia, merupakan gambaran realitas yang disederhanakan yang bisa digunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa benar-benar bertindak. Jadi, jika serangkaian tindakan dianggap perlu diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atau proses untuk menginformasikan kepada kita dampak apakah yang mungkin timbul dan sampai seberapa jauh tujuan bisa tercapai. Peran ini diisi oleh sebuah model. Sebuah model mungkin saja berupa bagan struktur organisasi, persamaan matematika, program komputer, diagram, atau mungkin sekedar sebuah gambaran mental mengenai situasi yang ada di pikiran pembuat model. Model-model kebijakan (yang digunakan untuk meramalkan dampak suatu pilihan atau alternatif)

biasanya merupakan struktur matematis yang dibantu dengan program komputer, dan banyak juga diantaranya menggunakan model mental sederhana, digunakan sepanjang proses analisis untuk mendefinisikan lingkup permasalahan, mengukur pencapaian suatu tujuan, menampilkan hasil dan dimanapun analisis membuat sebuah keputusan.

1.2.5 Latihan

Pemerintah Targetkan Peraturan Ojek Online Rampung Maret 2019



Sumber: <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-peraturan-ojek-online-rampung-maret-2019-ddw4>

Gambar 1. 1 Ilustrasi Latihan

Kehadiran gojek di tengah-tengah masyarakat mempunyai implikasi baik itu positif maupun negatif. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat menuntut akan hal-hal instan dan mudah. Perusahaan transportasi berbasis aplikasi/platform itu merupakan salah satu unicorn di Indonesia. Namun disisi lain Pemerintah sebagai regulator belum menemukan formulasi baku untuk mengatur kehadiran gojek di masyarakat. Apakah itu dari sisi tarif, hubungan perusahaan dengan mitra pengemudi, mekanisme hukumnya, dan status usaha dari perusahaan taksi online tersebut?

Dari uraian kasus diatas, kerjakan tugas dan pertanyaan berikut:

1. Rumuskan permasalahan kebijakan pengaturan ojek online
2. Coba rumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat oleh pemerintah sebagai win-win solution antara Pemerintah, perusahaan, dan mitra pengemudi?

3. Melihat kasus ini, termasuk dalam analisis kebijakan sebelum atau sesudah kebijakan, kegiatan tersebut?

1.3 Penutup

1.3.1 Rangkuman

Analisis kebijakan publik merupakan ilmu terapan yang menggabungkan dari beberapa ilmu atau multidisipliner. Adanya analisis kebijakan publik mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker untuk memecahkan masalah-masalah publik. Didalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Di dalam analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis kebijakan **sebelum** dan **sesudah** adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Sedangkan analisis sesudah kebijakan berarti fokus analisisnya adalah sebuah kebijakan publik yang telah ada baik itu sedang berjalan atau sudah tidak dilaksanakan lagi. Terdapat beberapa manfaat penting mengapa analisis kebijakan publik diperlukan, salah satunya adalah dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik dan dengan analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

1.3.2 Test Formatif

A. Pilihan Ganda

Untuk memperdalam pemahaman anda terkait dengan materi diatas, kerjakanlah latihan berikut ini:

1. Ilmu terapan yang menggabungkan beberapa ilmu dengan tujuan untuk mencari sebuah alternatif dalam memecahkan masalah publik disebut:
 - a. Implementasi kebijakan
 - b. Kebijakan publik
 - c. Analisis kebijakan publik
 - d. Isu publik

2. Kebijakan publik tentang penataan ruang terbuka hijau di sebuah daerah tertentu telah banyak menuai kontroversi karena banyak merugikan aktivitas masyarakat. Kemudian hal ini mendorong bagi stakeholders untuk mengkaji kebijakan tersebut di masa depan. Hal ini bisa disebut dengan:
 - a. Analisis kebijakan publik sesudah
 - b. Formulasi kebijakan
 - c. Agenda Setting
 - d. Alternatif kebijakan
3. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh organisasi publik sering disebut dengan:
 - a. Kebijakan Publik
 - b. Manajemen Publik
 - c. Masalah publik
 - d. Instruksi
4. Bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil disebut:
 - a. Analisis kebijakan publik antisipatif
 - b. Analisis kebijakan publik integratif
 - c. Analisis kebijakan publik substantif
 - d. Analisis kebijakan publik retrospektif
5. Apa tujuan akhir yang mendasari ilmu analisis kebijakan publik itu penting untuk dilakukan:
 - a. Merumuskan alternatif kebijakan
 - b. Membuat kebijakan
 - c. Mengkoordinasikan para stakeholder
 - d. Menghentikan sebuah kebijakan

Kasus: Pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2019 telah berakhir. Pemilihan umum yang diadakan serentak tersebut menyimpan banyak memori. Salah satunya adalah tragedi kemanusiaan, banyak para pelaksana pemilu jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Menurut data KPU per Sabtu 4/5/2019, petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang sedangkan petugas yang sakit mencapai 3.788 orang. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>). Menurut beberapa ahli jatuhnya korban dari

panitia pemilu ini dikarenakan beban pekerjaan yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan kebijakan pemilu serentak Presiden, DPRD, DPR, DPD.

Banyak Korban Meninggal, Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

Sabtu, 27 April 2019 15:29 WIB



Media.com menunjukkan foto almarhum suaminya, Mujiyono, yang gugur saat menjadi KPPS di Bantul, Rabu (24/4/2019)
om-maxcdn.bootstrapcdn.com...

Gambar 1. 2 Ilustrasi Soal

Sumber: <http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/27/banyak-korban-meninggal-pemilu-serentak-harus-dievaluasi> diakses tanggal 08 Mei 2019.

Bagaimana bentuk analisis saudara terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan serentak

Dari kasus diatas, kerjakan tugas dari pertanyaan berikut ini:

1. Identifikasikan permasalahan kebijakan tentang pemilu serentak 2019
2. Berdasarkan indentifikasi yang anda lakukan, termasuk apa jenis analisis kebijakanya? Jelaskan beserta argument rasional dan basis teori yang telah disampaikan.

1.3.3 Umpan Balik

Score: $(0,40 \times \text{jumlah jawaban benar pilihan ganda} \times 5) + (0,60 \times \text{jumlah benar essay} \times 20)$.

1.3.4 Tindak Lanjut

Jika score anda kurang dari 80, maka ulangi lagi memahami uraian, rangkuman dan tes formatif.

1.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif

Kunci Jawaban

A. Pilihan Ganda

1. C
2. A
3. A
4. B
5. A

Kasus:

Pelaksanaan pemilu serentak banyak sekali menimbulkan duka mandalam bagi pahlawan demokrasi. Para petugas pemilu baik itu di tingkat paling bawah hingga atas banyak menjadi korban. Beberapa permasalahan yang bisa dievaluasi adalah bagaimana pelaksanaan pemilu serentak itu sendiri. Berdasarkan apa yang telah dipelajari bersama bahwa kebijakan pemilu serentak ini merupakan kebijakan yang sudah terlaksana. Dan Analisis kebijakan publik mencoba menganalisis kebijakan ini dengan pertama mengidentifikasi mengapa banyak korban berjatuhan

1. beban pekerjaan yang sangat banyak dengan waktu yang terbatas
2. minimnya infrastruktur pemilu
3. tidak diperhatikanya aspek kesehatan dari para petugas
4. belum memadainya distribusi logistic pemilu

Dari beberapa permasalahan tersebut analisis bisa merekomendasikan evaluasi kembali dengan beberapa kebijakan seperti misalnya memisahkan pemilu antara legislatif dan yudikatif. Memungkinkan pemilihan by sistem/aplikasi. Atau status quo dengan tetap melakukan kebijakan pemilu serentak, akan tetapi dengan perbaikan-perbaikan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis for Public Decisions*. New York: The Rand Corporation.
- Weimer, David L. And Vining, Aidan R. 1998. *Policy Analysis Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Abdul Wahab, Solichin. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Rineka Cipta.

Kismartini, dkk. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka Press.

Senarai

Policy Maker : Orang, institusi atau organisasi yang bertugas untuk membuat kebijakan

Policy Agenda: perumusan agenda-agenda kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai alternatif kebijakan di masa depan

Public Policy: Arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

Public Policy Analysis: Kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui pemahaman yang mendalam baik secara teori atau teknis untuk mencari alternatif kebijakan terbaik.

BAB II

Manfaat Analisis Kebijakan Publik

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Deskripsi Singkat

Pada bab manfaat analisis kebijakan publik mahasiswa akan mempelajari mengenai pentingnya analisis kebijakan publik sebagai sebuah studi untuk menghindari kegagalan kebijakan. Ada 3 alasan penting mengapa analisis kebijakan publik penting untuk dipelajari. Pertama adalah karena alasan ilmiah. Kedua, karena alasan professional. Ketiga, karena alasan politik. Setelah itu mahasiswa akan mempelajari manfaat dari adanya analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik mempunyai manfaat penting bagi upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

2.1.2 Relevansi

Setelah mempelajari materi pada bab II ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami (C2) pentingnya studi analisis kebijakan publik dan manfaat dari analisis kebijakan publik. Sehingga mahasiswa bisa bersikap kritis dan komprehensif terhadap sebuah kebijakan publik yang akan dan sudah dilaksanakan.

2.1.3. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan (C1) pentingnya analisis kebijakan publik dan manfaat analisis kebijakan publik dalam kehidupan masyarakat, sekaligus macam-macam dari analisis kebijakan publik.

2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) pentingnya analisis kebijakan publik
2. Mahasiswa mampu menguraikan (C2) apa saja manfaat dari analisis kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari
3. Mahasiswa mampu menterjemahkannya dalam contoh pemecahan masalah publik
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi (C1) macam-macam analisis kebijakan publik.

2.1.4 Petunjuk Pembelajaran

Bacalah tiap uraian dengan teliti. Tulis kembali secara ringkas ke dalam bentuk tabel atau resume. Kerjakan semua latihan soal dan tes formatif kemudian verifikasi jawaban anda dengan kunci jawaban yang disertakan di bagian akhir setiap bab.

2.2 Penyajian

2.2.1 Pentingnya Analisis Kebijakan Publik

Sebagai sebuah kajian ilmu terapan, analisis kebijakan publik mempunyai domain besar dan bersifat politis. Adanya analisis kebijakan publik secara langsung akan mempengaruhi secara langsung hasil akhir proses pengambilan keputusan. Analisis kebijakan publik menjadi sebuah lahan besar yang biasanya dilakukan oleh analis kebijakan, pusat penelitian dan kajian atau lembaga think tank lainnya.

Di Indonesia pendekatan analisis kebijakan publik lebih sering menggunakan pendekatan proses. Yaitu proses kebijakan publik, baik dari dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam studi analisis kebijakan publik analis bisa melakukan analisis dengan monodisiplin atau multidisiplin. Kemudian, pertanyaan besar muncul. Mengapa analisis kebijakan publik penting? Dengan menggunakan pendekatan proses (kebijakan publik) Anderson (1987) dan Dye (1978) menjelaskan alasan mengapa analisis kebijakan publik itu penting dalam tiga kategori berikut:

1. Alasan ilmiah

Melihat dari sudut pandang ilmiah analisis kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat bagaimana pola dan proses analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik akan menghasilkan kebijakan itu berhasil sesuai kaidah ilmiah yang sistematis.

2. Alasan profesional

Melihat dari sudut profesional maka analisis kebijakan publik dimaksudkan untuk membantu *policy maker* memecahkan masalah-masalah publik dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kebijakan publik penting juga karena untuk meminimalisasi gagalnya sebuah kebijakan atau memberikan alternatif lain ketika kebijakan publik tertentu menemui jalan buntu.

3. Alasan politik

Analisis kebijakan publik diharapkan akan memperoleh sebuah kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, dan menghindari kegagalan dalam implementasi kebijakan. Tujuan utama adanya kebijakan publik adalah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Dengan begitu tujuan secara politis yang dilakukan oleh pemerintah bisa terpenuhi. Alasan politis dari analisis kebijakan publik juga berbeda dengan nasehat kebijakan atau rekomendasi kebijakan. Analisis kebijakan publik pada umumnya bersangkutan dengan penelitian dan penggambaran secara cermat mengenai sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik.

Seperti contoh: Beberapa tahun lalu pemerintah memberlakukan kebijakan tax amnesty. Sebelum diimplementasikan ke masyarakat kebijakan tax amnesty akan dianalisis bagaimana implikasinya di masyarakat. Sebelum itu kebijakan tax amnesty diambil oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam bidang pajak. Selain itu juga membawa uang warga Indonesia yang selama ini disimpan di lembaga keuangan luar negeri.

2.2.2 Manfaat Analisis Kebijakan Publik

Tujuan dari analisis kebijakan adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Di samping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selama ini aplikasi analisis kebijakan meliputi wilayah permasalahan yang sangat luas, misalnya energi, pendidikan, hubungan internasional, kriminalitas, kesejahteraan masyarakat, pengangguran, transportasi, lingkungan hidup, stabilitas keamanan, kemiskinan, dan sebagainya. (Dunn, 1994). Seking banyaknya bidang studi yang menjadi kajian. Hal tersebut menjadikan analisis kebijakan publik semakin rumit.

Jika kita perhatikan bagaimana dinamika kebijakan publik di Indonesia secara khusus, tidak sedikit kebijakan publik yang gagal dan tidak mencapai apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tersebut. Banyak hal yang menjadi penyebab mengapa sebuah kebijakan publik mengalami kegagalan. Permasalahan yang sangat kompleks, tidak terpenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, kurangnya kompetensi pelaksana dan tidak tepatnya *target group* dari sebuah kebijakan.

Indikasi kegagalan dari sebuah kebijakan bisa kita lihat misalnya dengan banyaknya keluhan-keluhan masyarakat yang terus-menerus mengenai program-program yang tidak

efektif dan menghambur-hamburkan uang, adanya pertumbuhan industri tetapi tidak memberikan kemakmuran masyarakat, adanya kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian orang yang sudah kaya. Banyak contoh kasus kebijakan seperti ini bisa dilihat misalnya: Kebijakan Kredit Usaha Tani (KUT), yang hasilnya kurang mengena kepada masyarakat petani bahkan hanya menghamburkan dana dan menguntungkan orang-orang tertentu.

Kegagalan kebijakan publik dengan berbagai alasan tersebut diatas sebenarnya dapat dikurangi jika kebijakan tersebut didahului dengan kajian yang komprehensif tentang isu kebijakan, dalam hal ini yang dimaksud adalah analisis kebijakan publik.

Lasswell dalam Dunn (1998) yang menyatakan bahwa Analisis Kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Karena efektifitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktek dan teori pembuatan kebijakan publik.

Contoh kebijakan publik yang gagal karena tanpa analisis kebijakan yang komprehensif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa nasib penerapan lima hari sekolah dengan delapan jam waktu belajar per hari atau full day school seperti yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 tahun 2017 kini berada di tangan Presiden Jokowi.

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pembatalan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin.

Badjuri dan Yuwono (2002-66) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni :

- a. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif bukan semata-mata pertimbangan sempit seperti misalnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menjadi persoalan berat di Indonesia oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politicking sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Contoh: Kebijakan menaikkan dana desa di tahun 2019 (Jokowi menyatakan bahwa pemerintah merencanakan untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 832,3 triliun atau meningkat 9 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi pada 2018 (Tempo.com Mei, 2019.) Kebijakan ini terlihat populis bagi sebagian orang, tapi jelas terdapat unsur politisnya karena terkait dengan pilihan presiden 2019. Sebagian orang menganggap bahwa kebijakan yang dijanjikan presiden itu justru akan membebani kas keuangan negara. Utang pemerintah pun berpotensi makin bertambah.

- b. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri pada visi dan misi yang jelas yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera.
- c. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah tim yang multi disiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (*expertise*).
- d. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategis yang mungkin akan terjadi ada masa yang akan datang.
- e. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti

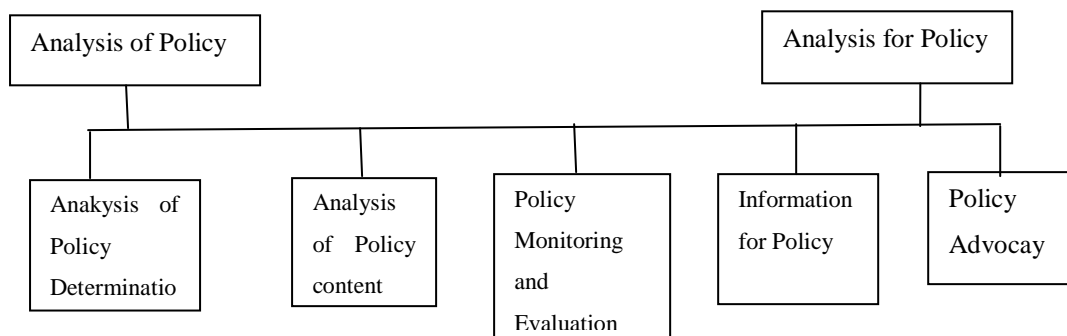
melibatkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme seperti misalnya melalui konsultasi publik, debat publik, curah fikir bersama berbagai pihak terkait (stakeholders), delibrasi publik dan sebagainya.

Analisis kebijakan akan sangat membantu menghindari suatu kebijakan yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan yang ilmiah dan rasional serta obyektif dalam rangka pembuatan kebijakan publik kadang sulit diperoleh, karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politicking sangat mewarnai pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari keadaan ini, karena analisis kebijakan memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima masyarakat.

2.2.3 Macam-macam Analisis Kebijakan Publik

Di dalam studi analisis kebijakan publik ada banyak sekali macam atau jenis analisis kebijakan yang dilakukan. Hal ini tentu tidak lepas dari sifat multidisiplin sendiri dari analisis kebijakan publik. Gordon, Lewis dan Gunn (Wayne Parsons), mengemukakan adanya macam-macam analisis kebijakan (*Policy Analysis*) seperti yang terlihat bagan ini:

Bagan 2. 1 Macam- Macam Analisis Kebijakan Publik



Sumber: (LAN, 2000)

Analysis of Policy, meliputi:

- a. *Policy Determination*, yaitu analisis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat dan untuk siapa dibuat (*how, when, for whom*).

b. *Policy Content*. Yaitu terkait dengan deskripsi suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang telah berlalu. Analisis ini lebih menitikberatkan pada substansi dari kebijakan dan apa tujuan kebijakan tersebut.

Policy Monitoring and Evaluation, meliputi:

a. *Policy Monitoring*, yaitu mengkaji bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dikaitkan dengan tujuan kebijakan

b. *Policy Evaluation*, yaitu apa dampak kebijakan tersebut terhadap permasalahan tertentu dan masyarakat pada umumnya.

Analysis for policy, meliputi:

a. *Policy Advocacy*, yaitu terkait dengan riset dan argument yang bertujuan untuk mempengaruhi policy agenda, baik diluar maupun di dalam pemerintah.

b. *Information for Policy*, yaitu suatu bentuk analisis yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian

2.2.4 Latihan

Buatlah analisis kebijakan di daerah (sesuai asal daerah) yang kalian anggap paling penting untuk dilakukan. Berikan alasan mengapa kebijakan itu penting untuk dilakukan, apa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat? Jelaskan juga teknis kebijakannya secara sederhana?

2.3 Penutup

2.3.1 Rangkuman

Studi analisis kebijakan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, analisis kebijakan publik dianggap penting karena mempunyai tiga alasan: Pertama adalah alasan ilmiah, yaitu untuk menambah pengetahuan baru dan kaidah sistematika ilmiah. Kedua, adalah alasan profesional yaitu analisis kebijakan publik dimaksudkan untuk membantu *policy maker* memecahkan masalah-masalah publik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, analisis kebijakan publik diharapkan akan memperoleh sebuah kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memenuhi tujuan-tujuan politis pemerintah yang berkuasa.

Ada banyak manfaat yang diperoleh dalam analisis kebijakan publik, seperti mempertimbangkan hal scientific, rasional dan obyektif. Hal ini menghindarkan dari

kebijakan publik yang subjektif, asumptif, *common sense* dan irasional. Analisis kebijakan publik juga bisa menjadi media dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Selain itu di tengah kehidupan masyarakat demokratis, kehadiran analisis kebijakan publik juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Analisis kebijakan publik juga mempunyai banyak macamnya mulai dari *analysis of policy*, *policy monitoring and evaluation*, dan *analysis for policy*. Macam-macam kebijakan publik ini akan memberikan pengetahuan yang komprehensif sesuai dengan konteks dari kebijakan publik itu sendiri.

2.3.2 Test Formatif

A. Pilihan Ganda

1. Analisis kebijakan publik dianggap akan mempunyai manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kaidah ilmiah secara sistematis. Pernyataan ini merupakan pentingnya manfaat analisis kebijakan publik pada aspek:

- a. Politis
- b. Profesional
- c. Ilmiah
- d. Objektif

2. Sebelum disulap menjadi kampung warna-warni di Kota Semarang, deretan pemukiman di Kelurahan Randusari merupakan salah satu kumuh. Namun berkat usaha dari pemerintah dan dibantu dengan partisipasi masyarakat. Saat ini pemukiman tersebut menjadi salah satu objek wisata *intragamable* bagi millennial di Kota Semarang dan sekitarnya. Berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu manfaat analisis kebijakan publik:

- a. Untuk memecahkan masalah-masalah publik
- b. Memberikan alternatif
- c. Identifikasi masalah publik
- d. Melaksanakan kebijakan publik

3. Analisis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat dan untuk siapa dibuat (*how, when, for whom*) disebut dengan?

- a. *Policy Termination*
- b. *Policy Formulation*
- c. *Policy Determination*

d. Policy Implementation

4. Berbicara tentang netralitas ASN (dulu PNS) dalam setiap pemilihan umum, terutama pemilihan umum kepala daerah (PILKADA). Tidak jarang banyak dari ASN mendukung salah satu partai atau paslon tertentu. Hal ini selalu menjadi polemik dan bahan diskusi menarik bagi akademisi, praktisi, maupun politikus. Hal ini mengingatkan peran dan fungsi dari ASN itu sendiri. Mengatasi hal seperti ini KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) merekomendasikan untuk menjaga netralitas birokrasi dari kepentingan politik partisan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pernyataan tersebut merupakan bentuk solusi kebijakan yang diberikan KASN bersifat?

- a. Rasional Objektif
- b. Logis Subjektif
- c. Tidak buru-buru
- d. Memenuhi keinginan sebagian masyarakat

5. Sebagai Negara hukum, banyak sekali produk kebijakan publik di Indonesia didasari oleh peraturan perundang-undangan. Namun dampaknya seringkali terjadi tumpang tindih antara hukum satu dengan lainnya. Kondisi ini tentu menyulitkan bagi pelaksana teknis ditingkat bawah. Melihat analisis kebijakan publik berdasarkan proses, apa yang semestinya dilakukan oleh stakeholders terkait kondisi tersebut?

- a. Implementasi kebijakan dengan baik
- b. Melakukan formulasi kebijakan secara tepat
- c. Mendiskusikan kembali dengan ahli
- d. Melakukan penilaian kebijakan

B. Kasus

Beberapa akhir ini terjadi kekerasan seksual dan bullying yang dialami oleh Audrey, salah seorang siswi SMP di Pontianak. Tindak kekerasan ini diawali dari saling ejek antara korban dan pelaku di sosial media. Kemudian berbuntut pada penganiayaan kepada korban. Penganiayaan ini salah satu penyebabnya adalah penggunaan gadget dan kurangnya pengawasan anak. Sekaligus mencoreng upaya kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Dampak kasus ini cukup menjadi perhatian sebgaiian masyarakat Indonesia mengingat melibatkan anak-anak. Menanggapi kasus tersebut coba lakukan hal-hal berikut:

1. Analisis kebijakan terkait perlindungan anak di Indonesia berdasarkan kasus tersebut?
2. Bagaimana pandangan saudara tentang penggunaan gadget dan sosial media oleh anak?. Jelaskan analisis kedua pertanyaan tersebut dengan teori dan konsep yang telah anda pelajari.

Instruksi:

Bentuk kelompok dengan 4-5 orang, diskusikan dan presentasikan satu minggu setelahnya!

2.3.3 Umpan Balik

Score: $(0,40 \times \text{jumlah jawaban benar pilihan ganda} \times 5) + (0,60 \times \text{jumlah benar essay} \times 20)$.

2.3.4 Tindak Lanjut

Jika score anda kurang dari 80, maka ulangi lagi memahami uraian, rangkuman dan tes formatif.

2.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. C
2. A
3. C
4. A
5. B

Kunci Kasus

Pahami secara seksama tentang kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu carilah beberapa referensi terkait dengan kasus tersebut. Jelaskan bagaimana implikasi negatif penggunaan gadget oleh anak termasuk bagaimana seharusnya bagaimana bentuk pengawasan orang tua terhadap aktivitas anaknya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Massachusetts: Duxbury Press.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: LAN
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, Ltd.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis for Public Decisions*. New York: The Rand Corporation.
- Weimer, David L. And Vining, Aidan R. 1998. *Policy Analysis Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Senarai

Policy Determination: analisis yang berkaitan dengan kebijakan itu dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat dan untuk siapa dibuat.

Policy Content: terkait dengan deksripsi kebijakan tertentu, bagaimana kebijakan itu dibuat dalam kaitanya dengan kebijakan-kebijakan sebelum-sebelumnya

Policy Monitoring: mengkaji bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dikaitkan dengan tujuan kebijakan

Policy Evaluation: apa dampak kebijakan tersebut terhadap permasalahan tertentu.

Policy Advocacy: terkait dengan riset dan argumen yang bertujuan untuk mempengaruhi policy agenda, baik diluar maupun didalam pemerintah.

Information for Policy: suatu bentuk analisis yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian.

BAB III Langkah-Langkah Analisis Kebijakan Publik

3.1 Pendahuluan

3.1.1 Deskripsi Singkat

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Ini sangat penting untuk dijadikan pedoman kegiatan secara keseluruhan. Analisis kebijakan publik secara umum dimulai dari perumusan masalah, peramalan atau forecasting, penyusunan rekomendasi kebijakan. Monitoring kebijakan dan terakhir evaluasi kebijakan.

3.1.2 Relevansi

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami (C2) langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik secara tepat dan sistematis. Sehingga analisis yang dilakukan dapat dimengerti secara baik. Selain itu mahasiswa dapat menerapkan (C3) langkah-langkah secara komprehensif dalam melakukan analisis kebijakan publik.

3.1.3 Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu merumuskan (C2) langkah-langkah analisis kebijakan publik secara runtut dan benar. Sehingga menjadi dasar untuk memperoleh alternatif kebijakan yang tepat di masyarakat.

2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik
2. Mahasiswa mengetahui bagaimana merumuskan masalah-masalah publik
3. Mahasiswa mampu menyusun kriteria untuk menentukan alternatif kebijakan
4. Mahasiswa dapat mengidentifikasi cara menilai alternative kebijakan
5. Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan.
6. Mahasiswa mengetahui ragam pendekatan dalam analisis kebijakan publik

3.1.4 Petunjuk Pembelajaran

Bacalah tiap uraian dengan teliti. Tulis kembali secara ringkas ke dalam bentuk tabel atau resume. Kerjakan semua latihan soal dan tes formatif kemudian verifikasi jawaban anda dengan kunci jawaban yang disertakan di bagian akhir setiap bab.

3.2 Penyajian

3.2.1 Berbagai Pendapat Ahli Mengenai Proses Analisis Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik dapat kita pelajari dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli kebijakan publik. Menurut Subarsono proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam membuat langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik, namun inti dari tujuan menganalisis kebijakan publik adalah sama untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada decision maker (Quade, 1988);(Mustopadidjaja, 2000);(Dunn, 2000);(Bridgman & Davis, 2000). Quade (1988-48), mengemukakan adanya proses analisis kebijakan sebagai berikut :

1. *Formulation* : *clarifying and constraining the problem and determining the objectives.*
2. *Search* : *identifying, designing and screening the alternatives*
3. *Forecasting* : *predicting the future environment or operational context*
4. *Modeling* : *building and using models to determine the impact*
5. *Evaluating* : *comparing and ranking the alternatives*

Semua langkah tersebut merupakan kegiatan yang khas untuk masing-masing tahapan secara sendiri-sendiri, akan tetapi semua langkah kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Permasalahan tentang kemiskinan atau kebijakan untuk mengurangi kemiskinan misalnya, di dalam analisis kebijakan kita sekaligus juga mempertimbangkan alternatif-alternatif apa yang sekiranya layak dikemukakan, demikian juga memprediksi dampak yang terjadi dari masing-masing alternatif yang kita kemukakan tersebut. Yang akhirnya bisa meranking setiap alternatif tersebut.

Langkah-langkah maupun yang disebutkan sebagai prosedur dalam analisis kebijakan publik tidak harus sama untuk setiap kajian kebijakan, yang utama bahwa kita bisa mengkaji permasalahan publik yang muaranya adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada decision maker. Demikian juga langkah-langkah tersebut tidak sepenuhnya harus

dilakukan secara berurut. Misalnya, mungkin langkah pertama dan ke empat dilakukan terlebih dulu, baru kemudian langkah ke dua dan ke tiga.

Dalam melaksanakan analisis kebijakan publik, hal pertama-tama yang kita kerjakan dan yang berikutnya kita kerjakan tergantung pada permasalahan dan konteks dilaksanakannya penyelidikan kita. Banyak penulis buku analisis kebijakan publik menyampaikan langkah-langkah kegiatan analisis, meskipun beberapa diantaranya agak sedikit berbeda dalam penyajiannya namun panduan tersebut dapat diikuti oleh mahasiswa dalam mempelajari langkah-langkah dalam kegiatan analisis kebijakan publik.

Langkah atau tahapan dalam analisis kebijakan menurut pendapat Mustopadidjaja (2000-15) disebutkan terdapat tujuh langkah, yakni:

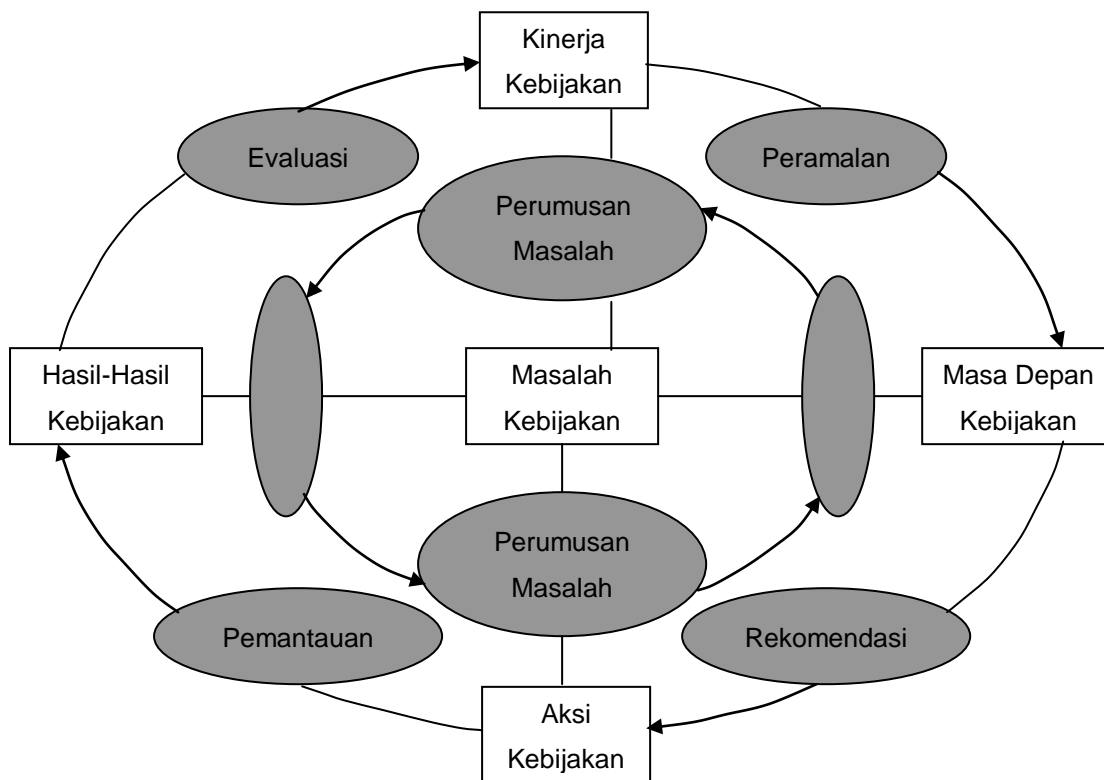
- a. Pengkajian persoalan
- b. penentuan tujuan
- c. Perumusan alternatif
- d. Penyusunan model
- e. Penentuan kriteria
- f. Penilaian alternatif
- g. Perumusan rekomendasi

Sebagaimana maksud dilaksanakannya analisis kebijakan publik, bahwa dapat memberikan nasehat atau rekomendasi kebijakan pada penentu kebijakan maka muara dari kegiatan analisis kebijakan adalah berupa rumusan rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada penentu kebijakan. Setelah diberikannya rekomendasi kepada penentu kebijakan, secara pekerjaan analisis memang sudah selesai. Namun ada juga pendapat yang menunjukkan bahwa analisis perlu mengikuti implementasi dan evaluasi hasil dari kebijakan yang direkomendasikan.

Dunn (2000-21) berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni :

- a. Perumusan masalah (definisi), menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
- b. Peramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.

- c. Rekomendasi (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.
- d. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
- e. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.



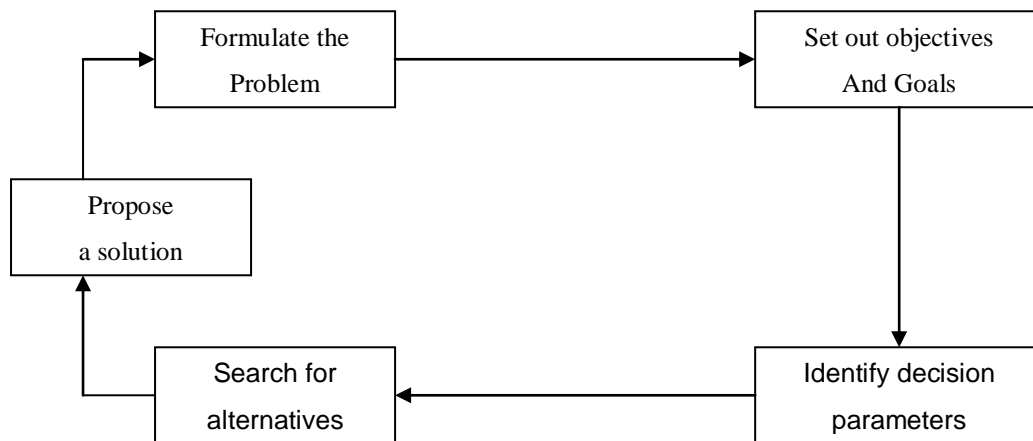
Bagan 3. 1 Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah

Sumber: Dunn, 2000

Ditambahkan oleh Dunn bahwa metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan: apa hakekat permasalahan? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah, dan hasil apa yang dapat diharapkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan.

Sehingga hubungan antara analisis kebijakan dengan tipe-tipe informasi yang relevan tergambar dalam bagan di atas.

Sedangkan pakar kebijakan publik dari Australia Bridgman and Davis (2000, 49) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik berupa sebuah proses kegiatan yang tidak berhenti dari perumusan masalah, penentuan tujuan dan sasaran, identifikasi parameter pencapaian tujuan, pencarian alternatif dan usulan kebijakan. Digambarkan dalam bagan berikut ini:



Bagan 3. 2 Iterasi Analisis Kebijakan

Sumber: Bridgman & Davis (2000)

3.2.2 Langkah-Langkah Analisis Kebijakan Publik

Dari uraian tersebut di atas analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh langkah dasar. Ke tujuh langkah tersebut adalah: (a) formulasi masalah kebijakan; (b) Formulasi Tujuan; (c) Penentuan Kriteria; (d) Perumusan Alternatif; (e) Pembuatan Model; (f) Menguji Alternatif; (g) Memberikan Rekomendasi Kebijakan.

1. Formulasi Masalah Kebijakan

Salah satu bagian penting dalam analisis kebijakan publik dan sering dilupakan adalah perumusan masalah kebijakan. Ketika *decision maker* mengetahui adanya masalah-masalah publik (*public problems*), dalam hal ini pemerintah ingin mengatasinya. Maka pemerintah perlu memutuskan untuk melakukan serangkaian tindakan unntuk mengatasi masalah tersebut. Untuk memperoleh alternatif-alternatif tersebut, diperlukan apa yang namanya perumusan kebijakan (Howlett dan Ramesh, 1995).

Perumusan masalah atau pengaturan masalah adalah suatu usaha yang dibuat oleh analis untuk memisahkan atau mendefinisikan masalah tertentu yang jika diselesaikan akan

memperbaiki keadaan. Tentunya analis ingin agar masalah itu adalah masalah dimana dia punya beberapa harapan akan suatu penyelesaian dengan sumber-sumber daya analitis dan waktu yang dia miliki.

Perumusan masalah barangkali adalah merupakan langkah awal dalam kegiatan analisis kebijakan publik dan merupakan hal yang paling kritis. Mengingat karakter permasalahan publik yang tidak terstruktur, maka imaginasi, pendapat dan panduan berpikir intuitif lebih membantu analis dibandingkan dengan kemampuan teknis dan matematis. Meskipun perumusan masalah akan dibahas secara lebih detail dalam modul tersendiri, namun kiranya disini diperlukan untuk dikemukakan secara garis besarnya mengingat begitu pentingnya bahasan ini.

Ketika memulai studi, awalilah dengan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- a. Bagaimana situasinya timbul? Mengapa hal itu menjadi masalah?
- b. Siapa saja yang percaya bahwa itu merupakan suatu masalah?
- c. Mengapa solusi itu penting? Jika suatu analisis dilakukan apa yang akan dilakukan? Akankah seseorang atau lembaga bisa bertindak atas rekomendasi?
- d. Bagaimana seharusnya solusi itu? Solusi yang seperti apa yang bisa diterima?
- e. Apakah sesungguhnya itu masalah yang tepat? Apakah tidak mungkin itu hanya manifestasi atau gejala dari masalah yang jauh lebih besar atau lebih dalam?
- f. Apakah akan lebih baik untuk mengerjakan masalah yang lebih besar, jika ada?

Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawabannya, gambaran yang lebih jelas mulai muncul berkenaan dengan sifat dasar masalah, ruang lingkungannya dan keuntungan yang nampaknya dihasilkan dari usaha analitis.

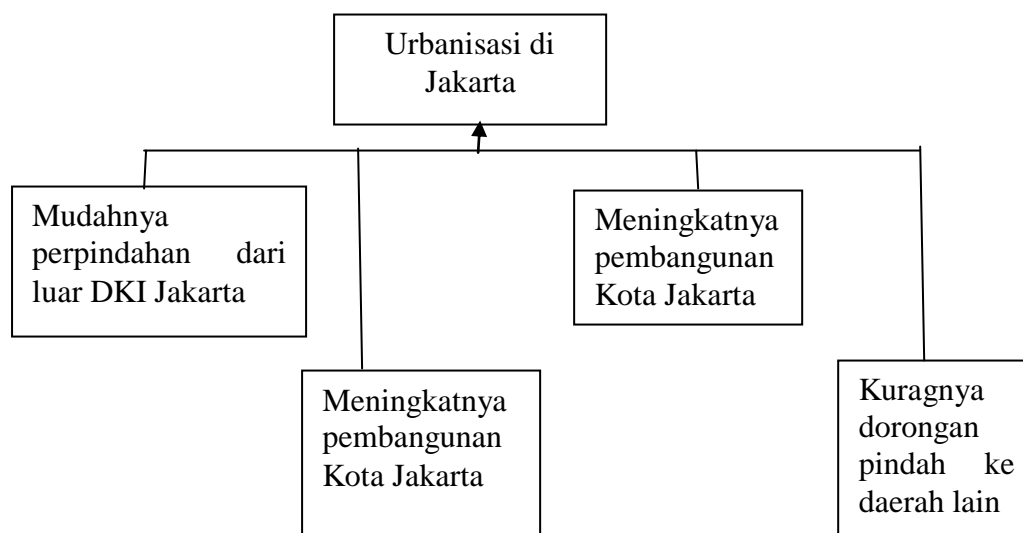
Ada dua jenis masalah yang bisa diidentifikasi yaitu masalah privat dan masalah publik. Berbicara tentang masalah publik, pembuat kebijakan harus teliti dan berhati-hati. Untuk menentukan sesuatu dikatakan sebagai sebuah masalah publik, seringkali terjadi ketidaksepakatan antara satu sama lain. Sesuatu yang dianggap masalah bagi seseorang belum tentu dipandang sebagai sebuah masalah oleh orang lain. Jones dalam Islamy (2001) mendefinisikan masalah sebagai “peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat diartikan secara berbeda pada waktu yang berbeda. Banyak masalah yang timbul akibat dari satu peristiwa yang sama”. Smith dalam Islamy (2001) juga mendefinisikan sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan dalam masyarakat.

Menurut ilmuwan sosial terkhusus administrasi publik terjadi diskursus panjang mengenai *public goods* dan *private goods*. Adalah Barry Bozeman yang pertama kali mencetuskan istilah publik dalam studi administrasi. Ia mengemukakan gagasan bahwa suatu organisasi bersifat publik sejauh dibatasi oleh atau menggunakan otoritas politik versus ekonomi. Hal itu didukung oleh Pesch (2009) yang membedakan istilah publik dan privat berdasarkan ekonomi (*private problems*) dan politik (*public problems*). Diskursus mengenai privat dan publik berpengaruh pada indentifikasi masalah, apakah sebuah masalah itu dikatakan hanya masalah privat atau masalah publik.

Pada hakikatnya *public problem* merupakan masalah-masalah yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang tidak langsung terlibat di dalamnya. Sedangkan *private problem* adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas, dengan kata lain hanya berkaitan dengan satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung. Dan yang menjadi dasar perumusan masalah adalah mengetahui masalah publik yang terjadi.

Dalam merumuskan masalah kebijakan (publik), *policy maker* perlu merumuskannya dalam bentuk sebab akibat. Harus jelas, mana yang faktor penyebab (*independent variable*) dan mana faktor akibat (*dependent variable*). Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis masalah. Misalnya dengan pohon masalah (*problem tree*) atau analisis masalah dengan “tulang ikan” (*fish bones*). Contoh analisis masalah dengan pohon masalah, tentang meningkatnya arus urbanisasi di DKI Jakarta. Oleh karena itu perlu dicari penyebabnya

Bagan 3. 3 Contoh Pohon Masalah



Sumber: (LAN, 2008)

Untuk dapat mengkaji sesuatu permasalahan secara tepat, kita perlu mengetahui/menguasai 3 hal: yakni teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya, dan ini berkembang menjadi *policy question* yang diangkat dari *policy issues* tertentu. Teori dan metode yang diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk *evaluation research*, metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substansi persoalan yang dihadapi. Serta informasi mengenai permasalahan yang sedang dilakukan studi. Perlu dijadikan pedoman dalam penelitian adalah “rumuskanlah persoalan secara operasional dan fungsional”. Maksudnya rumusan tersebut harus nyata dan jelas pengertiannya serta terjabarkan mana faktor-faktor penyebab (*independent variable*) dan faktor-faktor yang merupakan akibat (*dependent variable*).

2. Perumusan Tujuan

Rumuskan secara realistis-rasional apa yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala sebagai tantangan yang harus dihadapi. Tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari. Secara umum suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik, atau mencegah terjadinya keburukan atau kerugian-kerugian yang semaksimal mungkin. Nah, kewajiban analisis dalam tahapan ini adalah merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan-satuan tertentu.

Analisis merumuskan tujuan analisis akan memperoleh gambaran terkait apa yang hendak diraih. Tidak ada sebuah analisis kebijakan publik tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Bahkan analisis kebijakan publik yang tidak mempunyai tujuan hampir dipastikan tidak akan pernah berhasil. Contohnya adalah Pemerintah mengeluarkan pembatasan kantong plastik untuk konsumen yang berbelanja di toko retail atau swalayan. Meskipun mendapat dukungan dan anstusias tinggi dari masyarakat. Namun kebijakan ini tidak konsisten sampai sekarang dan justru menimbulkan permasalahan plastik di masyarakat. Beberapa analisis mengungkapkan pada waktu itu pemerintah belum mempunyai instrument yang jelas terlebih lagi tujuan mengenai pembatasan itu belum dirumuskan secara detail dan rasional.



Gambar 3. 1 Masalah Plastik di Indonesia

Atas kegagalan kebijakan plastik pada masa lalu, sampai saat ini permasalahan sampah plastik di Indonesia tidak berujung. Bahkan akhir-akhir ini semakin kompleks. Hal itu diperparah dengan proses penguraian sampah plastik yang membutuhkan waktu lama.

3. Penentuan Kriteria

Kriteria bersifat multi dimensi, perlu dipilih mana yang paling relevan (ekonomi, politik, administrasi, teknologi dan sebagainya). Setiap alternatif akan dinilai berdasarkan kriteria ini. Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Hal-hal yang sifatnya pragmatis memang diperlukan seperti ekonomi (efisiensi, dsb) politik (konsensus antar stakeholders, dsb), administratif (kemungkinan efektivitas, dsb) namun tidak kalah penting juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah (equity, equality, dsb).

Analisis kebijakan biasanya tidak menyatakan bagaimana seharusnya bentuk atau isi sebuah keputusan, ia hanya mencoba menyatakan bahwa menurut pandangan kriteria yang dipilih melalui pengetahuan terbaiknya dan sesuai dengan kecenderungan pembuat keputusan dengan membuat sendiri urutan di dalam ranking tersebut. Dua hal yang biasanya menjadi kriteria adalah efektifitas dan efisiensi. Wibawa (1994) menjelaskan efektifitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan. Sementara efisiensi pada dasarnya mempersoalkan perbandingan antara input sumberdaya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Hanya saja kedua kriteria ini seringkali bersifat kontradiktif, karena program yang efektif belum tentu efisien dan demikian sebaliknya.

Berkaitan dengan kontradiksi antara efektifitas dan efisiensi, Bryant dan White (1987) memberikan contoh dalam hal mengimplementasikan program pembuatan saluran air,

penggunaan mesin mungkin sangat efektif. Tetapi ini mahal dibandingkan jika pemimpin proyek mengerahkan rakyat untuk menggali saluran sendiri. Cara kedua mungkin tidak efektif, tapi yang jelas sangat efisien. Kecuali itu upah yang diterima oleh rakyat dapat mereka manfaatkan untuk memelihara saluran kemudian hari, karena mereka dilibatkan dalam pembangunan.

Contoh tersebut menunjukkan pada kita selain efektivitas dan efisiensi sebagai pertimbangan memilih suatu kebijakan atau program masih terdapat kriteria-kriteria lain. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya

- a. Waktu pencapaian
- b. Tingkat pengaruh yang diinginkan
- c. Perubahan perilaku masyarakat
- d. Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek
- e. Tingkat kesadaran masyarakat atau kemampuan dirinya

Beberapa ahli menjelaskan beberapa kategori dari kriteria Bardach misalnya (Patton dan Sawicki, 1986) ada 4 kategori sebagai parameter kriteria

1. Technical Feasibility (Kelayakan teknis) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan. Kriteria ini memusatkan perhatiannya pada apakah alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan layak secara teknis.
2. Economic and Financial possibility (kemungkinan ekonomi dan finansial) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan dan berapa keuntungan yang dihasilkan
3. Political Viability, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah kebijakan akan berhasil dimana terdapat pengaruh dari berbagai kelompok kekuasaan seperti: pembuat keputusan, legislatif, administrator, organisasi social, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan dan aliansi politik lainnya.
4. Administrative operability: yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemungkinan-kemungkinan untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan dalam konteks politik, social dan yang tidak kalah penting adalah administrasi.

Terlepas dari kriteria yang diatas, analis kebijakan perlu melihat situasi masalah secara benar. Karena bisa jadi kriteria yang digunakan pada kasus satu tidak sama dengan kriteria pada kasus lainnya.

4. Penyusunan Model

Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model digambarkan dalam saling hubungan yang sifatnya rasional, kalau bisa dalam bentuk sebab akibat (causal order) : $Y = f(X1)$. Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut: Skematik model (contoh: flow chart), fisikal model (contoh: miniatur), game model (contoh: latihan pemadam kebakaran), simbolik model (contoh: rumus matematik).

Dalam bukunya *Policy Analysis*, E.S Quade (1994) mengemukakan bahwa suatu model merupakan suatu pengganti dari kenyataan; wakil realita yang diharapkan memadai untuk masalah yang dihadapi. Model tersebut terbentuk dari faktor yang relevan dengan situasi tertentu dan relevan dengan hubungan-hubungan di antaranya. Model adalah penting untuk analisis kebijakan publik. Meskipun kita tidak bisa memperkirakan akibat dengan adanya model ilmiah yang terbaik, model kebijakan memberi tahu pada kita tentang apa saja yang mungkin, yang didasarkan pada berbagai asumsi tentang faktor-faktor masalah dan dengan demikian menghasilkan informasi yang membantu kita untuk memahami situasi dengan lebih jelas.

Manfaat model dalam analisis kebijakan publik adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab. Dengan demikian model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusandan penentuan solusi, atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan.

Menurut Miftah Thoha (2003) merujuk pada Douglas Yates menjelaskan beberapa model yang sering digunakan dalam membangun pemerintah ada dua model kontradiktif. Model pertama disebut sebagai model pluralist-democracy dan model kedua dinamakan model administrative-efficiency. Dua model ini cenderung diartikan sebagai ideologi yang menjadi doktrin dalam mengatur Negara atau pemerintahan.

Selanjutnya model analisis kebijakan publik yang merujuk pada Lestert dan Stewart dikutip dari Budi Winarno ada dua yaitu: Model elitis dan pluralis

1. Model elitis

Model ini mempunyai asumsi bahwa kebijakan publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan dari elit yang memerintah. Argumentasi pokok dari model ini adalah bahwa bukan rakyat atau massa yang menentukan kebijakan publik melalui tuntutan-tuntutan mereka, tetap kebijakan publik ditentukan oleh elit yang

memerintah dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau badan yang berada dibawahnya.

Thomas R Dye dalam *The Irony Democracy* memberikan suatu ringkasan pemikiran terkait dengan model ini:

- a) Masyarakat terbagi menjadi suatu kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan (power) dan massa yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya kelompok kecil saja orang yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat sementara massa tidak memutuskan kebijakan.
- b) Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi. Para elit ini biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang ekonominya tinggi
- c) Perpindahan dari kedudukan non elit ke elit sangat pelan dan berkeselimbangan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya kalangan non elit yang telah menerima konsensus elit yang mendasar, dapat diterima dalam lingkaran pemerintahan.
- d) Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem social dan pemeliharaan sistem. Misalnya di Amerika Serikat consensus elit mencakup perusahaan swasta, hak milik pribadi, pemerintahan terbatas dan kebebasan individu.
- e) Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan masa, akan tetapi nilai-nilai elit yang berlaku
- f) Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa apatis. Sebaliknya, para elit mempengaruhi massa yang lebih besar.

Model ini lebih dikatakan otoriter dan cenderung provokatif. Dalam pandangan model ini kebijakan merupakan produk elit, merefleksikan nilai mereka dan membantu tujuan mereka.

2. Model pluralis

Model pluralis titik perhatiannya lebih bertumpu pada elit pada subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Pandangan pluralis bisa dirangkum dalam poin-poin berikut ini;

- a) Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan
- b) Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusan ini dibuat maka hubungan kekuasaan tersebut tidak

nampak. Hubungan ini akan digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendak dibuat.

- c) Tidak ada perbedaan antara elit dan massa
- d) Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Kesehatan merupakan aset dalam politik, tetapi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aset politik yang ada.
- e) Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas. Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi keputusan untuk semua masalah kebijakan.
- f) Kompetisi dapat dianggap berada di antara pemimpin. Kebijakan publik lebih lanjut dipandang merefleksikan tawar-menawar atau kompromi yang dicapai diantara kompetisi pemimpin-pemimpin politik.

5. Pengembangan Alternatif

Merupakan hipotesis yang diantisipasi menyebabkan rangsangan perubahan perilaku yang mengakibatkan rangkaian tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan. Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Dapat juga alternative kebijakan dirumuskan sebagai pilihan-pilihan di luar alat atau cara yang telah dipergunakan atau yang telah ada. Alternatif kebijakan merupakan tahap politik dengan mengajukan berbagai solusi potensial bagi masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik.

Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang karena beberapa hal: (1) Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah ada. (2) Dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji, (3) merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu.

6. Penilaian Alternatif Kebijakan

Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada langkah ketiga. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif feasible mana yang mungkin paling efektif dan efisien. Misalnya penilaian dari segi ekonomi; alternatif mana yang paling efisien atau yang memberikan keuntungan terbesar dengan besaran biaya yang dimiliki atau yang diperlukan.

Dari segi politik; alternatif mana yang dapat memberikan ketenangan pada publik tidak memunculkan gejolak publik. Dari segi lingkungan; alternatif mana yang mempunyai dampak positif yang lebih besar dari pada dampak negatif terhadap lingkungan. Dari administrasi; perlu dilihat apakah alternatif secara kelembagaan bisa dilaksanakan.

Perlu juga menjadi perhatian bahwa, mungkin suatu alternatif secara ekonomis menguntungkan, secara administrasi bisa dilaksanakan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bahkan mempunyai dampak negatif kepada lingkungan. Maka untuk gejala seperti ini perlu penilaian etis dan falsafah atau bahkan mungkin diperlukan analisis trade of untuk bisa menilai secara lebih obyektif dimana masing-masing kepentingan tidak ditinggalkan. Jadi diperlukan penilaian setiap alternatif berdasarkan kriteria yang dipilih secara konsisten.

Menilai alternative adalah kegiatan memberi bobot (harga) pada aspek-aspek yang berkaitan dengan setiap alternative (Islamy, 2001). Sehingga nampak jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangan. Hal penting yang harus dilakukan saat menguji alternatif adalah

- 1) Membandingkan setiap alternatif
- 2) Melihat sifat setiap alternatif
- 3) Meramalkan dampak atau akibat baik positif ataupun negatif. Langsung ataupun tidak langsung yang ditimbulkan suatu alternatif

7. Rumuskan Rekomendasi

Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan-pilihan yang “tepat” untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi langkah terakhir ini tugas analisis kebijakan publik adalah merumuskan saran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum berdasarkan penilaian-penilaian tertentu yakni dari faktor ekonomi, politik, sosial, lingkungan maupun administrasi.

Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Dalam rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang yang disodorkan kepada publik decision maker.

3.2.3 Ragam Pendekatan Analisis Kebijakan

Setelah mengetahui mengenai langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik, analisis juga perlu memahami bagaimana tipe penulisan/penelitian/pendekatan yang sering

digunakan dalam analisis kebijakan. Cook dan Vaupel mengelompokkan tiga gaya penelitian yaitu:

1. Analisis kebijakan itu sendiri: Analisis kebijakan disini maksudnya adalah memorandum staf mengenai masalah tertentu yang dirumuskan secara sempit. Analisis ini sifatnya sederhana dan tidak begitu rumit sehingga proses penyelesaiannya biasanya hanya memakan waktu beberapa hari saja. Metode yang digunakan di dalamnya adalah metode yang sering digunakan seperti teknik-teknik dasar pengumpulan data, pengumpulan materi bacaan dan sintesis dari beragam gagasan ke arah tindakan yang sedikit koheren.
Contoh: Kementerian Sosial RI mengeluarkan kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) kepada keluarga yang rentan dan dalam golongan miskin. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa indikator keberhasilan atau kegagalan yang memungkinkan kebijakan ini tetap berlanjut atau tidak jika dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat.
2. Penelitian kebijakan: Pendekatan ini lebih mengacu pada bentuk monograf atau laporan formal terdokumentasi berupa analisis ringkas, tetapi memuat permasalahan yang cukup luas dan detail. Misalnya saja penentuan atau penyamaan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, setelah sebelumnya terjadi diferensiasi harga di beberapa daerah. Dalam melakukan ini policy maker atau pemerintah tidak bisa secara cepat menentukan kebijakan tipe ini, perlu waktu dan argumentasi yang mendalam. Selain itu metode yang digunakan juga sangat beragam. Seperti misalnya analisis biaya manfaat, analisis sistem, atau teknik lain yang lebih kompleks. Di beberapa Negara maju analisis ini sudah lama digunakan oleh para analis, baik mereka yang penuh waktu dan paruh waktu di berbagai instansi pemerintah. Contohnya di Belanda dan Inggris di Kantor Perdana Menteri atau Di AS sebagai staf senior yang diperbantukan di kantor kepresidenan di Gedung Putih.
3. Penelitian ilmu sosial terapan: Pada pendekatan ini lebih mengacu pada evaluasi akademis terhadap dampak intervensi kebijakan yang ditunjukkan dalam beberapa hasil akhir (outcome) yang sebelumnya dirumuskan secara ketat. Misalnya analisis dampak mengenai penggunaan plastik. Kebijakan ini muncul ditengah ketergantungan masyarakat dampak negative dari penggunaan plastic terhadap lingkungan. Penelitian semacam ini bisa dilakukan oleh peneliti lingkungan dari kalangan akademisi atau praktisi yang berlatar belakang monodisipliner atau interdisipliner.

3.2.3 Latihan

Instruksi sebelum mengerjakan, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang!

Banyak sekali masalah publik yang terjadi di sekitar kita. Saudara sebagai mahasiswa sosial terkhusus administrasi publik perlu andil dalam mengkritisi dan menganalisis atas masalah-masalah publik tersebut. Tugas saudara dan kelompok buatlah analisis kebijakan publik secara sederhana berserta uraiannya dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya.

3.3. Penutup

3.3.1 Rangkuman

Ada banyak pendapat ahli mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik. Namun secara umum langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik yaitu: 1) formulasi masalah kebijakan; 2) Formulasi Tujuan; 3) Penentuan Kriteria; 4) Perumusan Alternatif; 5) Pembuatan Model; 6) Menguji Alternatif; 7) Memberikan Rekomendasi Kebijakan. Setelah mengetahui langkah-langkah tersebut, analisis perlu mengetahui beberapa tipe penelitian dalam melakukan analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan itu sendiri: yaitu memorandum staf mengenai masalah tertentu yang dirumuskan secara sempit. Analisis ini sifatnya sederhana dan tidak begitu rumit sehingga proses penyelesaiannya biasanya hanya memakan waktu beberapa hari saja.

Penelitian kebijakan: Pendekatan ini lebih mengacu pada bentuk monograf atau laporan formal terdokumentasi berupa analisis ringkas, tetapi memuat permasalahan yang cukup luas dan detail. Sedangkan yang terakhir Penelitian ilmu sosial terapan: Pada pendekatan ini lebih mengacu pada evaluasi akademis terhadap dampak intervensi kebijakan yang ditunjukkan dalam beberapa hasil akhir (outcome) yang sebelumnya dirumuskan secara ketat.

3.3.2 Test Formatif

A. Pilihan Ganda

1. Merumuskan isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai sebuah agenda kebijakan merupakan kegiatan analisis kebijakan yang sering disebut.
 - a. Alternatif Kebijakan
 - b. Perumusan Kebijakan
 - c. Forecasting

- d. Pengambilan keputusan
2. Pemerintah daerah di suatu tempat melakukan kebijakan pengusuran PKL di beberapa jalan-jalan protokol. Mereka berdalih adanya PKL (Pedagang Kaki Lima) sangat mengganggu ketertiban jalan dan tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memperindah kondisi kota. Disisi lain di daerah tersebut juga belum ada kawasan yang menyediakan tempat untuk membuka lapak bagi pedagang atau dengan kata lain belum ada sentra PKL. Namun tak berselang lama dari pengusuran. Para PKL ini berganti tempat dan tetap berjualan di trotoar-trotoar jalan lain. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah setempat belum mempunyai
 - a. Visi misi kebijakan
 - b. Implementor
 - c. Penanganan masalah
 - d. Tujuan kebijakan secara jelas dan rasional
 3. Proses penyediaan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan disebut dengan?
 - a. Forecasting
 - b. Perumusan masalah
 - c. Alternative kebijakan
 - d. Terminasi kebijakan
 4. Berikut ini pengertian proses perumusan tujuan analisis kebijakan, yakni kegiatan.
 - a. Menyusun hal-hal rasional yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala sebagai tantangan yang harus dihadapi
 - b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
 - c. Melegitimasi kebijakan definitif
 - d. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik

5. Kebijakan publik diartikan sebagai.

- a. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
- b. Semua tindakan negara
- c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
- d. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

B. Kasus

Beberapa bulan yang lalu, masyarakat dipertontonkan dengan film dokumenter yang berjudul “sexy killers”. Dalam film tersebut diceritakan sisi lain dalam produksi listrik yang dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu sisi lainnya adalah kerugian yang dialami oleh penduduk sekitar dari pembangunan PLTU yang selama ini menjadi prioritas utama pemerintah. Dampak negative tersebut bisa berupa gangguan kesehatan sampai kerusakan lingkungan hidup. Secara tersirat film itu juga mengkritik para konglomerat yang seolah-olah tidak memikirkan nasib rakyat kecil dan justru semakin mengembangkan bisnis kelompoknya masing-masing. Namun di pihak lain, sebagian masyarakat menganggap film ini bias informasi. Karena hanya mengangkat sisi negative dari pembangunan PLTU tanpa melihat mengapa PLTU itu dibangun, bagaimana fungsinya, dan bagaimana operasionalnya selama ini. Meskipun menimbulkan pro kontra masyarakat. Film ini telah berhasil menggugah nalar kritis masyarakat untuk bersikap bijak dalam menggunakan listrik dan aware terhadap lingkungan sekitar



Pembangunan Pembangkit Listrik - Pekerja menyelesaikan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/4/2016). Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x7 megawatt tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Sumbawa. (KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA)

Gambar 3. 2 Ilustrasi Soal

Sumber: <https://sains.kompas.com/read/2019/04/12/124242023/di-balik-terang-lampu-menyingskap-sisi-kelam-pltu-lewat-sexy-killers?page=all> diakses tanggal 25 Mei 2019

Melihat contoh kasus tersebut, coba lakukan analisis sederhana sesuai dengan langkah-langkah analisis kebijakan yang telah dipelajari.

3.3.3 Umpan Balik

Score: $(0,40 \times \text{jumlah jawaban benar pilihan ganda} \times 5) + (0,60 \text{ jumlah benar essay} \times 20)$.

3.3.4 Tindak Lanjut

Jika score anda kurang dari 80, maka ulangi lagi memahami uraian, rangkuman dan tes formatif.

3.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif

Pilihan Ganda

1. B
2. D
3. A
4. A
5. B

Kasus

Pahami dengan teliti dan detail mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisa kebijakan publik. Penekanannya adalah pada perumusan masalah yang tepat. Gunakan pendekatan multidisiplin menanggapi kasus diatas. Setelah itu kembangkan alternatif kebijakan yang paling memungkinkan dan realistis. Berikan argumentasi yang runtut. Alangkah baiknya berikan best prtices praktik energi terbarukan di Negara lain.

Pembangunan PLTU di Indonesia merupakan sebagai sebuah jawaban untuk memenuhi kebutuhan listrik. Apalagi komitmen pemerintah untuk memberikan listrik di seluruh penjuru nusantara. Hal itu kemudian menjadi alasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di beberapa wilayah. Selain karena biaya operasionalnya cukup terjangkau bagi Negara berkembang seperti Indonesia, adanya PLTU telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Seharusnya Indonesia berani mengembangkan energi terbarukan secara bertahap. Atau tetap mengembangkan status quo (ada PLTU) akan tetapi dengan perbaikan-perbaikan akses yang diterima oleh masyarakat, baik sisi lingkungan atau sosial budaya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Heclo, H. 1972. Policy Analysis. *British Journal of Political Science*.
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: LAN.
- Mustopaadidjaja, A.R. (1984). *Manajemen Proses Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Thoha, Miftah. (2004). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Patton, Carl V and Sawicki David S. (1986). Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall

Wibawa, Samodra; Yuyun Purbokusumo; Agus Pramusinto. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Senarai

Decision Maker: Individu, kelompok atau organisasi publik pembuat dan pengambil keputusan.

Forecasting: peramalan mengenai informasi yang akan terjadi di masa depan.

Private problems: isu-isu yang berkembang di masyarakat dan hanya berdampak pada perseorangan atau kelompok

Public Problems: isu-isu yang berkembang di masyarakat dan dampaknya di rasakan oleh semua masyarakat.

BAB IV Pembuatan Policy Paper

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Deskripsi Singkat

Policy paper merupakan salah satu output dari sebuah analisis kebijakan publik. Dengan adanya *policy paper* kita bisa mengaplikasikan koseptual dan langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik dalam sebuah kasu atau masalah publik. Policy paper merupakan bentuk analisis paling sederhana dan praktis sebagai bahan masukan pengambil keputusan dalam analisis kebijakan publik.

4.1.2 Relevansi

Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami (C2) masalah dan tujuan pembuatan *policy paper*; mengetahui (C1) esensi nilai dalam pembuatan kebijakan. Sehingga mahasiswa memahami (C2) proses pembuatan *policy paper* dengan sistematis dan benar. Sehingga mahasiswa dapat mendemostrasikan hasil analisisnya secara sederhana ke dalam sebuah format *policy paper*.

4.1.3 Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu merumuskan (C2) sebuah analisis kebijakan publik secara sederhana dalam bentuk *policy paper*. Sehingga mahasiswa mampu mempraktekannya dalam menganalisis sebuah masalah yang berkembang di masyarakat.

2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mengetahui apa itu masalah dan tujuan dalam *policy paper*
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi esensi nilai dalam kebijakan
3. Mahasiswa mengetahui penyusunan format *policy paper*

4.1.4 Petunjuk Pembelajaran

Bacalah tiap uraian dengan teliti. Tulis kembali secara ringkas ke dalam bentuk tabel atau resume. Kerjakan semua latihan soal dan tes formatif kemudian verifikasi jawaban anda dengan kunci jawaban yang disertakan di bagian akhir setiap bab

4.2 Penyajian

4.2.1 Masalah dan Tujuan dalam Policy Paper

Dunn, 2000 (2) mengingatkan tentang kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. bahwa pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijakan. Sama pentingnya dengan itu, analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dengan menanyakan pertanyaan yang “benar”, masalah yang semula tampak tak terpecahkan kadang-kadang dapat dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ketika ini terjadi, ungkapan “tak ada solusi, tak ada masalah” dapat diganti ungkapan sebaliknya: “masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan”.

Penting untuk diperhatikan bagi analis langkah awal dalam memulai pekerjaan adalah membuat kesamaan visi, misi dan tujuan dilakukannya analisis kebijakan publik antara analis dan penentu kebijakan (*public decision maker*). Hal ini akan mempermudah langkah-langkah berikutnya dalam pekerjaan analisis kebijakan publik. Demikian juga akan mempengaruhi kebijakan publik ketika diimplementasikan.

Setelah analis atau *policy maker* mengetahui bagaimana masalah dan tujuan dari analisis kebijakan, mereka perlu memahami bagaimana esensi dari sebuah kebijakan. Sebuah *policy paper* yang merupakan alternatif sederhana tentang sebuah pemecahan masalah, bisa dikatakan juga *outputnya* adalah sebuah kebijakan.

4.2.2 Esensi Nilai (Values) dalam kebijakan

Nilai (*value*) dalam diskursus analisis kebijakan publik pada umumnya akan menyentuh aspek *metapolicy*, karena menyangkut hakikat (*substance*), perspektif, sikap dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik. Dalam kerangka ilmu kebijakan publik, masalah *metapolicy* ini masih jarang dibahas di Indonesia (lihat Soedjatmoko. 1984 dan Solichin, 2012).

Metapolicy mempersoalkan mengapa kebijakan tertentu dipikirkan, dan bagaimana ia diimplementasikan. *Metapolicy* lebih memfokuskan persoalan-persoalan yang agak bersifat

filosofis dan politis ketimbang masalah-masalah yang bersifat teknis-administrasi. Semisal prosedur rutin administrasi dan birokrasi. Sekalipun begitu, dalam mengedepankan persoalan nilai, bukan berarti *metapolicy* sama sekali tidak berpijak pada landasan empirik.

Berbicara nilai sebuah analisis kebijakan publik utamanya kebijakan publik tidak lepas dari bebas nilai (*value free*) atau tanpa nilai (*value less*). Melainkan karena sarat nilai (*value loaded*). Disamping itu, karena sejak lahir dasawarsa 1980-an atau awal dasawarsa 1990 an banyak negara maju yang memulai menyadarinya, baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan, pemerintah kian dituntut untuk lebih memperhatikan masalah-masalah *environmental protection* (pelestarian lingkungan) dan human rights (hak-hak asasi manusia). Seperti misalnya saat ini, pembangunan tidak hanya bagaimana membuat kondisi masyarakat lebih baik daripada sebelumnya. Akan tetapi juga memikirkan bagaimana keberlanjutan untuk generasi mendatang. Gagasan ini kemudian kita kenal dengan SDG's (*Sustainable Development Goals*).

Berkaitan dengan masalah lingkungan biasanya memberikan penegasan bahwa lingkungan alam tidaklah sekadar dianggap sebagai kondisi perifer, melainkan lebih sebagai *the supporting structure for economic activities* (struktur pendukung untuk kegiatan ekonomi). Sedangkan sustainability mengutamakan tindakan restorasi dan preservasi. Meskipun konsep pertumbuhan tidak ditinggalkan begitu saja, namun juga harus diukur secara kualitatif. Oleh karena itu pertumbuhan harus diukur berdasarkan membaiknya kualitas hidup. Bukan diukur dari sudut agregat nilai pasar dari produk domestik bruto per kapita.

Masalah kedua yang sering menjadi bahan menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah masalah hak asasi manusia. Bahasan ini dianggap penting karena seperti kita lihat perkembangan dunia saat ini, banyak terjadi pelanggaran HAM di beberapa Negara, seperti gejolak perang di timur tengah, genosida muslim di Rohingya, dan kawasan lain yang sedang dalam konflik.

Kesadaran akan pentingnya masalah hak asasi telah melampaui batas-batas geopolitik. Apalagi pada zaman seperti ini, zaman yang memungkinkan orang bisa mengakses informasi di seluruh penjuru dunia. Akibatnya muncul gerakan-gerakan yang bersifat global. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, selagi masih menggantungkan sumber-sumber keuangan internasional (*external fund*) dalam membiayai pembangunan ekonominya, maka tidak bisa harus memperhatikan masalah tersebut. Mereduksi hak asasi manusia sebagai urusan dalam negeri tampaknya akan menimbulkan kesulitan dan membangkitkan kecurigaan

masyarakat internasional. Responsivitas Indonesia dalam masalah HAM akan menjadi salah satu variable penentu bagi posisi Indonesia di mata internasional.

Pembuat analisis kebijakan publik bisa berlatar belakang darimana saja. Selama dia mampu dan mengetahui dasar-dasar dalam analisis kebijakan. Namun yang menjadi prioritas adalah dari pemerintah. Hal itu tidak lepas dari apa yang menjadi tugas pemerintah dalam mengatasi masalah publik dan memikirkan kondisi yang lebih baik di masyarakat (kemaslahatan). *Saking* dekatnya hubungan antara analisis kebijakan publik dengan kemaslahatan publik Fisterbuch (1983) membaginya dalam 5 unsur yaitu keamanan (*security*), hukum dan ketertiban umum (*law and order*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*), dan kesejahteraan (*welfare*). Di Negara-negara maju, isu-isu yang menyangkut persoalan keamanan, hukum, dan ketertiban sudah lama tidak menjadi isu yang kontroversial dalam keputusan-keputusan kebijakan (*policy studies*) pemerintah. Karena itu, bagi para pembuat kebijakan di Negara-negara ini isu yang selalu menyedot perhatian mereka ialah yang menyangkut nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kesejahteraan.

Pentingnya ketiga nilai diatas juga tercermin dengan jelas dalam pertarungan pemikiran yang kritis diantara para ahli. Dari waktu kewaktu 3 nilai tersebut menjadi sebuah hal fundamental bagi analis dalam melakukan analisis kebijakan. Sebagian besar pembuat kebijakan publik termasuk para pejabat-pejabat pemerintah senior. Andaikan ditanya mereka akan menjawab mengemban tugas mulia untuk mewujudkan ketiga nilai yang telah dibahas tadi: Kesejahteraan umum, keadilan (persamaan), dan kebebasan. Di Indonesia nilai yang disebut terakhir telah diberi muatan lokal “bukan kebebasan mutlak”, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya para analis akan menginterpretasikan bahwa mereka dalam memainkan peranya, menyandarkan diri pada etika pluralisme. Etika pluralis mengendalikan bahwa tidak ada satu prinsip atau nilai apapun yang dianggap lebih tinggi/lebih penting dari yang lainnya.

Ada satu anggapan bahwa idealnya pembuat kebijakan itu seharusnya memiliki kearifan layaknya seorang filsuf raja atau ratu pandito (*Philosopher King*). Ia diharapkan mampu membuat, serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara adil, sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan umum tanpa melanggar kebebasan pribadi. Namun, realitanya menunjukkan bahwa keputusan kebijakan tidak mampu memaksimalkan ketiga nilai diatas. Juga tidak ada bukti pendukung yang cukup meyakinkan nilai yang satu lebih penting nilai yang lainnya. Misalnya keadilan dan kebebasan, kebebasan dengan kesejahteraan, atau kesejahteraan dan keadilan. Menyadari akan hal itu, maka keputusan-keputusan kebijakan mau tidak mau harus memperhitungkan *multiple* nilai

4.2.3 Menyiapkan Sebuah “*FORMAT POLICY PAPER*”

Policy paper merupakan bentuk analisis berupa naskah yang menjelaskan sebuah masalah dan bagaimana pemecahan masalahnya secara ilmiah. Seringkali orang awam memaknai *policy paper* dengan menitik beratkan pada penyajian data dan informasi. Menurut Kumorotomo, dalam format *policy paper* ada 3 urutan mengenai informasi. Pertama adalah fakta yaitu informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif. Sifatnya murni dan bebas nilai (*value-free*). Kedua interpretasi merupakan penafsiran seorang atas fakta tertentu. Interpretasi mungkin bersifat objektif, tetapi informasi mengenai sumbernya harus jelas karena mungkin banyak unsur subjektifnya. Ketiga Opini adalah pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah. Opini sifatnya bebas dan merupakan sarana penting demokratisasi. Tetapi membuat keputusan harus cermat dalam menggunakan opini karena sifatnya yang subjektif.

Mempersiapkan sebuah *issue paper* pada dasarnya tidak lebih dari menyusun suatu pendekatan untuk mendefinisikan masalah. *Issue paper* mencoba mendefinisikan apa sesungguhnya masalah itu, memisahkan sasaran fundamental untuk mengusulkan alternatif dan ukuran keefektifan yang tepat dan untuk mengidentifikasi bagian masyarakat yang terpengaruh. Juga menampilkan daftar agen pemerintah dan organisasi yang terkait. Menemukan dan mendata sumber-sumber yang dapat diterapkan dengan mudah pada masalah ini. Namun *issue paper* tidak melakukan penyelidikan dan perbandingan dampak-dampak berbagai alternatif, karena hal tersebut akan menjadi bagian dari analisis itu sendiri.

Berbicara tentang isu, tidak sedikit dari kita yang memahami sebagai sebuah hal negatif. Seperti misalnya kabar burung. Kabar burung bahwa si Fulan tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan penyuapan untuk pemenangan tender pengerjaan jembatan oleh Pemerintah daerah X. Kemudian sebagian orang berkomentar, “ah itu hanya isu, jangan percaya”. Selanjutnya makna isu tidak sesederhana itu saja, lebih kompleks dari itu, dan perlu meluruskan makna isu.

Dalam beberapa literatur, istilah isu tidak pernah dirumuskan secara jelas. Namun sebagai sesuatu yang teknis, terutama dalam konteks analisis kebijakan publik atau kebijakan publik kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan oleh Anderson yaitu *policy problem*. Isu kebijakan secara lazim merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu

masalah tertentu (Dunn, 1990). Disisi lain isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga mengandung peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1986).

Isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (*alternative policies*), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friedland, 1990). Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau perbedaan persepsional di antara para aktor atas situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan peringkatnya, isu kebijakan publik, secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar yaitu (Dunn, 1990):

1. Isu utama
2. Isu sekunder
3. Isu fungsional
4. Isu minor

Kategorisasi ini menjelaskan bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditemukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, semakin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu isu maka makin strategis pula fungsinya secara politis. Namun perlu dicatat bahwa kategorisasi isu diatas hendaknya tidak dipahami secara kaku. Sebab dalam praktiknya, masing-masing peringkat isu tadi bisa jadi tumpang tindih, atau dengan kata lain suatu isu yang tadinya hanya merupakan isu sekunder kemudian berubah menjadi isu utama.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak pernah ada masyarakat yang terbebas dari isu. Dalam masyarakat, isu kebijakan atau analisis kebijakan tidak pernah berhenti dan benar-benar selesai. Ia bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, budaya politiknya dan karakter sistem politiknya. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks masalah yang dihadapi.

Policy paper bukan sekadar hanya penyajian data saja. Sebagai sebuah produk paling sederhana dari kebijakan publik, policy paper bersifat kompleksitas dinamis karena berubah seiring waktu, saling tergantung, dipengaruhi umpan-balik, bersifat non-linier, adaptif, dan sulit diperkirakan. Dalam membuat policy paper ada beberapa hal yang bisa diperhatikan agar gagasan kita diperhatikan oleh policy maker (Kumorotomo, 2013):

- a) Pemaksaan pendapat tidak akan produktif. Mengakomodasi pendapat yang bertentangan justru menunjukkan kredibilitas penulis makalah
- b) Pengakuan atas pendapat yang berseberangan menunjukkan bahwa anda telah menelisik semua kemungkinan, memahami semua aspek, dan memiliki informasi yang cukup
- c) Ingat, tetaplah menggunakan nada yang seimbang (balance tone) ketika menolak pendapat lain
- d) Bijak tetapi kokoh (*tactful yet firm*): sekuat apapun keinginan kita untuk mengubah kebijakan, penghargaan atas tindakan perumus kebijakan yang telah dilakukan akan tetap penting. Banyak usulan kebijakan yang tolak hanya karena soal bahasa dan cara penyampaian.

Bagian-bagian utama dari format standart isu paper ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Latar belakang masalah

Merupakan deskripsi yang pendek dan jelas dari suatu masalah, persoalan atau keadaan yang ditujukan untuk analisis, dari mana asalnya, apa saja tandatandanya, mengapa hal itu menjadi suatu masalah. Hal-hal tersebut dapat dirumuskan dalam berbagai pertanyaan seperti berikut: Apa yang sebetulnya jadi masalah? Apa yang nampaknya menyebabkan hal ini menjadi masalah? Faktor-faktor apa yang diduga menyebabkan adanya suatu masalah?

II. Kelompok-Kelompok Sasaran

Memperhatikan siapa atau apa yang seharusnya dipertimbangkan sebagai target dari program atau kebijakan dalam rangka pemecahan masalah, supaya bisa jelas dan tidak bias. Pada dasarnya ini adalah hal-hal yang menjadi tujuan kegiatan tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah menguraikan populasi secara spesifik, misalnya karakter umum mereka. Contoh: jika program kesehatan yang dipertimbangkan, kelompok targetnya bisa jadi yang berhubungan dengan penyakit tertentu, atau mereka yang berada dalam kelompok beresiko tinggi.

Pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan juga menjadi kelompok-kelompok yang harus dipertimbangkan. Pada program ketertiban jalan di kota, barangkali menguntungkan sebagian besar warga kota atau pengguna jalan, namun membuat para pedagang kaki lima (PKL) menjadi kalang kabut. Demikian juga program pengurangan polusi udara, program pengendalian obat-obatan

terlarang dan sebagainya. Dalam semua kasus barangkali penting untuk memperkirakan secara kuantitatif sejumlah orang yang diuntungkan dan sejumlah orang yang dirugikan. Pertanyaan tentang siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang dirugikan bersifat sentral bagi penyelesaian masalah dan persoalan kebijakan. Sebab itu penting untuk memasukkan kelompok-kelompok tersebut dalam pikiran dan pertimbangan dalam mencari solusi kebijakan.

III. Alternatif-Alternatif

Untuk tiap alternatif, pokok informasi tertentu bisa membantu, diantaranya adalah :

- 1) Deskripsi. Deskripsi yang jelas tentang bagaimana alternatif tersebut bekerja, personil dan peralatan yang diperlukan, fasilitas yang dibutuhkan, kebijakan dan teknologi yang digunakan, agen yang terlibat dalam kegiatan.
- 2) Keefektifan. Seberapa besar keefektifan dari alternatif jika diterapkan dalam sebuah kebijakan, tentunya terkait dengan ukuran-ukuran keefektifan yang digunakan.
- 3) Biaya. Memperkirakan besaran biaya yang diperlukan dari setiap alternatif kebijakan sangat diperlukan, meskipun dalam perhitungan sementara yang akan diperhalus nantinya setelah dikaji secara seksama dari alternatif tersebut.
- 4) Spillovers (efek samping) adalah hal yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi menimpa orang atau institusi yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan yang dianalisis. Hal ini perlu diidentifikasi efek penting berkenaan dengan alternatif, dan dicatat siapa yang menanggung biaya atau siapa yang menikmati keuntungan.

IV. Rekomendasi

Kira-kira rekomendasi yang tepat untuk issue paper atau pada tahap awal adalah :

- 1) Membatalkan keseluruhan subyek dianggap tidak layak untuk analisis lebih lanjut.
- 2) Melanjutkan analisis tapi pada prioritas tertentu.
- 3) Mengerjakan atau melanjutkan analisis dengan studi penuh.

Kemungkinan informasi tersedia begitu banyak selama persiapan studi, sehingga rancangan alternatif bisa dituangkan begitu jelas sehingga rekomendasi bisa dibuat. Dalam situasi seperti ini rancangan awal menjadi sebuah studi.

Contoh *format policy paper* dapat dikemukakan disini sebagai alternatif ketika ingin menyusun sebuah laporan analisis kebijakan publik.

CONTOH : *FORMAT POLICY PAPER*

<p>Eksekutif Summary</p> <ul style="list-style-type: none">• Pentingnya dilakukan analisis kebijakan publik• Garis besar analisis dari alternatif-alternatif• Rekomendasi kebijakan <p>I. Latar Belakang Masalah</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi tentang masalah yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah.• Latar belakang permasalahan, dan teori yang berkaitan dengan masalah.• Langkah-langkah yang pernah ditempuh dan gambaran tentang hasil guna dari kebijakan-kebijakan yang lampau. <p>II. Rumusan Masalah (<i>Substantive Problem</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">• Identifikasi masalah• Rumusan masalah kebijakan• Rumusan tujuan kebijakan• Kriteria keberhasilan kebijakan <p>III. Alternatif Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none">• Deskripsi alternatif• Prakiraan hasil dari tiap-tiap alternatif <p>IV. Penilaian Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none">• Penilaian alternatif• Perbandingan alternatif <p>V. Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Alternatif yang disarankan• Langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan.

Secara detail apa yang harus dilakukan dari tiap-tiap substansi dalam format tersebut, telah dijelaskan secara singkat pada bab sebelumnya. Contohnya policy paper dari Bappenas yang berjudul “Strategi dan Kebijakan Dalam Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2014”. Dalam policy paper itu analisis berusaha membahas permasalahan ekspor daging

yang dilakukan Indonesia pada tahun 2014. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mencanangkan program swasembada daging sapi. Namun menurut beberapa pengamat implementasi program belum berhasil karena beberapa permasalahan substansial di lapangan.



Gambar 4. 1 Ilustrasi Masalah

Sumber: <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=23143> diakses tanggal 28 Mei 2019

Pertama analisis menguraikan permasalahan seperti kesenjangan produksi domestik dengan konsumsi dengan berbagai data. Kemudian dijelaskan juga bagaimana kualitas sapi lokal, industri sapi lokal dan harganya. Permasalahan tersebut diperparah dengan ketahanan pangan nasional yang tidak stabil; Keterbatasan persediaan pangan karena pergeseran fungsi lahan; Penerapan biosecurity yang masih lemah. Kemudian analisis menggunakan pendekatan kelembagaan dan analisis SWOT untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil alternatif kebijakan yang paling realistis untuk diimplementasikan.

Hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Kumorotomo, bahwa struktur dari policy paper terdiri dari:

1. Pendahuluan
2. Perumusan masalah
3. Gambaran Umum
4. Objek Perdebatan dan Pandangan yang berbeda
5. Bahasan dan pembuktian
6. Kesimpulan

4.2.4 Latihan

Indonesia sebelumnya dikenal mempunyai luas hutan yang sangat luas. Namun semenjak muncul tren globalisasi dan industrialisasi, cakupannya terus berkurang. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hebat yang menyebabkan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami kerusakan. Akibatnya luas hutan di pulau tersebut juga mengalami penurunan.

Pengelolaan gambut berkelanjutan dan masalah akut kesenjangan ilmiah

Januari 12, 2018 4.07pm WIB



Gambar 4. 2 Ilustrasi Masalah

Sumber: <http://theconversation.com/pengelolaan-gambut-berkelanjutan-dan-masalah-akut-kesenjangan-ilmiah-89887>

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah berupaya merestorasi lahan gambut yang bermasalah dengan mengeluarkan [Peraturan Pemerintah No. 57/2016](#) untuk merevisi PP 71/2014 mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Salah satu pasal PP 57 menyatakan ekosistem gambut dengan fungsi budi daya dinyatakan rusak bila muka air tanah lebih dari 40 sentimeter di bawah permukaan gambut pada titik penataan. Pengaturan tinggi muka air tanah (*ground water table*) bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah gambut agar tidak mudah terbakar ketika musim kering.

Namun batas kriteria peraturan tersebut yang ditetapkan secara *ad hoc*, kemungkinan keterlibatan atau konsultasi dengan para akademisi terbatas, dan tidak didukung oleh penelitian dan bukti ilmiah yang memadai. Implementasi peraturan tersebut juga seharusnya

memperhatikan keseimbangan sosio-ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar lahan gambut.

Menanggapi peraturan baru tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan turunannya, para akademisi dan praktisi lahan gambut menggelar *focus group discussion* di Bogor, 14 Desember 2017, untuk membahas cara terbaik pengelolaan gambut yang berwawasan lingkungan.

Lahan gambut adalah salah satu penyimpan karbon tertinggi di daratan bumi. Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas, dengan kisaran data terakhir sekitar 13,2 juta hektar. Sebelum 1990-an, tanah gambut dianggap sebagai lahan marginal, sehingga pengelolaan tidak diperhatikan. Proyek pengembangan [lahan gambut satu juta hektar](#) di Kalimantan Tengah yang diluncurkan pada 1995 berniat untuk mengubah lahan gambut menjadi lahan penanaman padi. Proyek tersebut gagal total, padi tidak bisa tumbuh dengan baik karena gambut yang dikeringkan berlebihan menjadi rusak. Gambut menjadi kering pada musim kemarau sehingga memicu kebakaran.

Berbicara mengenai lahan gambut, gambut memiliki dua fungsi utama yaitu pelayanan lingkungan (Penyimpan air, karbon, dan keanekaragaman hayati) dan penghasil komoditas pertanian yang mendukung kehidupan para pertanian. Pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap pengelolaan lahan gambut dengan membentuk lembaga non struktural yakni BRG (Badan Restorasi Gambut) nasional yang tanggung jawabnya dibawah langsung oleh Presiden.

Anda sebagai analis kebijakan publik, coba rumuskan *policy paper* yang mencoba mengulas secara singkat tentang kondisi lahan gambut nasional, dan bagaimana alternatif yang anda tawarkan kepada *policy maker*.

4.3 Penutup

4.3.1 Rangkuman

Policy paper merupakan bentuk analisis berupa naskah yang menjelaskan sebuah masalah dan bagaimana pemecahan masalahnya secara ilmiah. Untuk menyusun policy paper yang baik dan benar. Analis perlu mengetahui terlebih dahulu apa masalahnya dan apa tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan policy paper tersebut.

Setelah analis atau *policy maker* mengetahui bagaimana masalah dan tujuan dari analisis kebijakan, mereka perlu memahami bagaimana esensi dari sebuah kebijakan. Sebuah

policy paper yang merupakan alternatif sederhana tentang sebuah pemecahan masalah, bisa dikatakan juga outputnya adalah sebuah kebijakan.

Nilai (value) dalam diskursus analisis kebijakan publik pada umumnya akan menyentuh aspek *metapolicy*, karena menyangkut hakikat (substance), perspektif, sikap dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik. Dalam kerangka ilmu kebijakan publik, masalah *metapolicy* ini masih jarang dibahas di Indonesia.

Metapolicy mempersoalkan mengapa kebijakan tertentu dipikirkan, dan bagaimana ia diimplementasikan. *Metapolicy* lebih memfokuskan persoalan-persoalan yang agak bersifat filosofis dan politis ketimbang masalah-masalah yang bersifat teknis-administrasi. Semisal prosedur rutin administrasi dan birokrasi. Sekalipun begitu, dalam mengedepankan persoalan nilai, bukan berarti *metapolicy* sama sekali tidak berpijak pada landasan empirik.

Mempersiapkan sebuah issue paper pada dasarnya tidak lebih dari menyusun suatu pendekatan untuk mendefinisikan masalah. Dalam beberapa literatur, istilah isu tidak pernah dirumuskan secara jelas. Namun sebagai sesuatu yang teknis, terutama dalam konteks analisis kebijakan publik atau kebijakan publik kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan oleh Anderson yaitu *policy problem*. Isu kebijakan secara lazim merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu (Dunn, 1990). Disisi lain isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga mengandung peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1986).

Berdasarkan peringkatnya, isu kebijakan publik, secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar yaitu (Dunn, 1990):

1. Isu utama
2. Isu sekunder
3. Isu fungsional
4. Isu minor

Policy paper bukan sekadar hanya penyajian data saja. Sebagai sebuah produk paling sederhana dari kebijakan publik, *policy paper* bersifat kompleksitas dinamis karena berubah seiring waktu, saling tergantung, dipengaruhi umpan-balik, bersifat non-linier, adaptif, dan sulit diperkirakan. Dalam membuat *policy paper* ada beberapa hal yang bisa diperhatikan agar gagasan kita diperhatikan oleh *policy maker* (Kumorotomo, 2013):

- a) Pemaksaan pendapat tidak akan produktif. Mengakomodasi pendapat yang bertentangan justru menunjukkan kredibilitas penulis makalah
- b) Pengakuan atas pendapat yang berseberangan menunjukkan bahwa anda telah menelisik semua kemungkinan, memahami semua aspek, dan memiliki informasi yang cukup
- c) Ingat, tetaplah menggunakan nada yang seimbang (balance tone) ketika menolak pendapat lain
- d) Bijak tetapi kokoh (*tactful yet firm*): sekuat apapun keinginan kita untuk mengubah kebijakan, penghargaan atas tindakan perumus kebijakan yang telah dilakukan akan tetap penting. Banyak usulan kebijakan yang tolak hanya karena soal bahasa dan cara penyampaian.

Policy paper pada umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah, kelompok-kelompok sasaran, alternatif, dan rekomendasi. Pada umumnya policy paper merupakan paparan yang bersifat teknis dan holistic dengan didukung data dan argumentasi untuk mengatasi suatu masalah.

4.3.2 Test Formatif

A. Pilihan Ganda

1. Apa yang pertama dilakukan oleh analis kebijakan publik dalam proses pembuatan policy paper.
 - a. Penyamaan visi dan misi
 - b. Identifikasi masalah
 - c. Menyusun strategi
 - d. Analisis stakeholders
2. Adanya sebuah anggapan bahwa seorang analis kebijakan publik harus bersikap layaknya seorang filsuf. Hal ini mengingatkan betapa rumitnya menjadi seorang analis kebijakan publik yang dituntut harus adil dan mengedepankan kepentingan publik. Maka analis haru mempunyai sifat demokratis, musyawarah mufakat dan bijak. Beberapa hal tersebut menjadi prasyarat yang harus dipenuhi menjadi seorang analis kebijakan publik. Berikut yang bisa menjadi seorang analis kebijakan publik adalah kecuali.
 - a. berlatar belakang apa saja
 - b. mempunyai pemikiran yang holistik
 - c. memahami masalah publik

d. bersikap subyektif

3. Seorang mengatakan bahwa harga-harga sembako di pasaran mengalami kenaikan. Hal ini sangat membuat gerah untuk keluarganya yang hidup secara pas-pasan. Apalagi dengan kondisi pasca diputus kontraknya di tempat ia bekerja. Kondisi ini sungguh memprihatinkan dan ia menuntut pemerintah membuka akses lapangan pekerjaan yang luas. Di sisi lain ada sebuah kondisi jalan di desanya yang rusak parah, ketika musim penghujan seperti kubangan dan musim kemarau penuh dengan debu. Jika anda sebagai pengambil keputusan mana yang menjadi masalah publik

- a. memberikan lapangan pekerjaan
- b. menurunkan harga sembako
- c. memperbaiki jalan desa
- d. memberikan bantuan sembako

4. Usaha membangun kekuasaan di tingkat elit birokrasi juga dilakukan seorang Bupati dengan mengangkat pejabat yang dinilai akan loyal kepadanya. Jabatan yang berada dibawah kendali langsung oleh bupati umumnya untuk jabatan-jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Dinas Pendidikan. Nilai strategis intitusi-institusi terutama terletak pada fungsi penting institusi tersebut mengambil keputusan yang berkenaan dengan anggaran dan proyek daerah serta rekrutmen dan promosi pegawai. Sedangkan tiga dinas yang disebut diatas menyerap jumlah anggaran yang besar setiap tahunnya. Untuk jabatan ini Bupati akan memberikan penawaran langsung kepada pejabat yang dikehendaki.

Kasus sebagaimana yang dideskripsikan diatas menunjukkan betapa seorang kepala daerah memiliki kepentingan yang sangat besae dengan membangun jaringan di dalam birokrasi yang dipimpinya. Jika anda merupakan pengamat birokrasi dan pemerintahan, apa hal realistis yang seharusnya diperbaiki dengan latar belakang instrumen yang telah ada saat ini.

- a. Memberikan tindakan represif kepada kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaan
- b. Melaporkanya ke kepolisian.
- c. Membuat sistem inspektorat yang independen dan mengoptimalkan peran KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di daerah agar menjaga netralitas birokrasi.
- d. Memberikan efek jera kepada aparat lokal berupa potongan gaji.

5. Mudik merupakan tradisi yang selalu melekat pada masyarakat Indonesia menjelang hari raya Idul Fitri. Masyarakat kota yang mayoritas berasal dari desa menyempatkan pulang untuk beberapa hari untuk menjenguk sanak famili di kampung. Pemerintah melalui beberapa kementerian berusaha memperlancar jalannya mudik dengan membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai seperti pembangunan tol trans Jawa. Adanya tol ini sangat efisien untuk mempersingkat jarak waktu dari daerah A ke daerah B. Akan tetapi beberapa ruas jalan yang biasanya dilewati oleh para pemudik menjadi sepi. Akibatnya para pedagang di beberapa ruas jalan provinsi cenderung menurun angka pendapatannya. Menyikapi permasalahan ini apa yang semestinya dilakukan pemerintah terkait dengan kondisi ini
- a. Merelokasi pedagang untuk mengisi beberapa rest area di beberapa ruas tol.
 - b. Menertibkan pedagang di jalur-jalur regular.
 - c. Membangun pusat kuliner dan perbelanjaan
 - d. Melakukan pelebaran jalan

2. Kasus

Kota Semarang hampir setiap tahun mengalami masalah banjir di beberapa wilayahnya. Permasalahan ini seolah tidak ada habisnya. Maka wajar kemudian masyarakat mengenal sebuah lagu khas yaitu "... Semarang kaline banjir Jo semelang rak dipikir Jangkrik upo sobo ning tonggo Melompat ning tengah jogan...". (..Semarang sungainya banjir, jangan khawatir tidak dipikirkan, Belalang bermain di rumah tetangga, melompat di tengah lantai rumah..) Penggalan lirik lagu Jangkrik Genggong yang dinyanyikan Waldjajah tersebut sesuai dengan kondisi Kota Semarang saat ini. Sejumlah wilayah di Kota Lumpia tersebut tergenang banjir. Aktivitas warga terganggu dan sejumlah warga khawatir kapan banjir akan surut.

Usai Hujan Badai, 3 Kawasan di Kota Semarang Terendam Banjir

Antara · Selasa, 04 Desember 2018 - 01:10 WIB



Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2018/12/05/10580601/banjir-melanda-kota-semarang-drainase-tersumbat-hingga-permintaan-maaf?page=all>. Diakses tanggal 11 Juni 2019

Gambar 4. 3 Ilustrasi Kasus

Beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintah kota ataupun provinsi untuk mengatasi hal ini. Akan tetapi hasilnya bisa kita lihat sendiri. Banjir masih menjadi momok tahunan bagi Kota Semarang. Jika anda diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada stakeholders. Coba rumuskan policy paper sederhana disertai dengan data atau fakta yang relevan dengan masalah!

4.3.3 Umpan Balik

Score: $(0,40 \times \text{jumlah jawaban benar pilihan ganda} \times 5) + (0,60 \text{ jumlah benar essay} \times 20)$.

4.3.4 Tindak Lanjut

Jika score anda kurang dari 80, maka ulangi lagi memahami uraian, rangkuman dan tes formatif.

4.3.5 Kunci Jawaban Test Formatif

Pilihan Ganda

1. B

2. D

3. C

4. C

5. A

Kasus:

Anda perlu membaca referensi terkait dengan permasalahan banjir baik dengan menggunakan data sekunder. Sertai dengan beberapa fakta yang menyebabkan banjir di Kota Semarang. Sebagai proses benchmarking, coba telaah dengan usaha beberapa kota di dunia untuk mengatasi banjir. Selain itu gunakan pendekatan social budaya sebagai bagian dari usaha preventif mencegah terjadinya banjir.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Heclo, H. 1972. Policy Analysis. *British Journal of Political Science*.
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: LAN.
- Mustopaadidjaja, A.R. (1984). *Manajemen Proses Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Thoha, Miftah. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Patton, Carl V and Sawicki David S. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall
- Wibawa, Samodra; Yuyun Purbokusumo; Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Senarai

Policy paper: Sebuah analisis kebijakan publik yang dirumuskan sederhana, memuat beberapa data dan fakta serta solusi secara konkret dari sebuah masalah

Isu Publik: masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, akan tetapi tidak semua isu dijadikan dasar untuk analisis kebijakan publik. Tergantung sekala prioritas, dan urgensi sebuah isu itu sendiri.

INDEX

A

Ayam broiler, 15, 16, 20, 26, 27, 31

K

Konversi, viii, 15, 16, 20, 26, 27, 31

P

pakan, 15

Pelet, 15

Produksi, 15, 16, 20, 26, 27, 31